

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 2022

<https://papua.bps.go.id>





INDIKATOR

PASAR TENAGA KERJA

PROVINSI PAPUA

2022



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 2022

No. Publikasi : 94000.2327
Katalog BPS : 2302004.94
Ukuran Buku : B5 (18,2 x 25,7 cm)
Jumlah Halaman : xiii + 108 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dicetak Oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) adalah survei yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Semester I (Februari) dapat menghasilkan angka estimasi nasional sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Semester II (Agustus) dengan jumlah sampel yang lebih banyak mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Pada tahun 2022, BPS Provinsi Papua menerbitkan publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Papua dengan kondisi Agustus 2022. Dalam publikasi ini menyajikan *Key Indicator of the Labour Market* (KILM) yang merupakan Indikator-indikator yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning sytem*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Provinsi Papua. Jenis tabel yang ditampilkan dalam publikasi ini dirinci menurut jenis kelamin, klasifikasi perkotaan dan perdesaan, serta hanya mencakup penduduk usia kerja. Beberapa indikator KILM menurut kabupaten/kota dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi penyesuaian terhadap publikasi edisi berikutnya.



Jayapura, Juni 2023

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua,

Adriana Helena Carolina, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
PASAR TENAGA KERJA: ANALISIS MENURUT KILM	1
1. Pendahuluan	3
2. Peran Sakernas dalam Indikator Pasar Tenaga Kerja	4
3. Mengenal KILM	5
4. Peran KILM dalam Analisis Indikator Pasar Tenaga Kerja	13
5. Sistematika Penulisan	16
PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PENDUDUK BEKERJA	17
1. KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	19
2. KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja	25
3. KILM 3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	29
4. KILM 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	32
5. KILM 5. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama	35
6. KILM 6. Pekerja Paruh Waktu	36
7. KILM 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	39
8. KILM 8. Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal	42
PENGANGGURAN.....	45
1. KILM 9. Pengangguran	47
2. KILM 10. Pengangguran Kelompok Muda	52
3. KILM 12. Setengah Pengangguran	57
4. KILM 13. Tingkat Ketidaktifan	60
PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF.....	67
1. KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf	69
UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA	75
1. KILM 15. Upah dan Biaya Kompensasi	77
PENJELASAN TEKNIS.....	81
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja 2022	19
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Tahun 2019 - 2022	20
3 Rasio Penduduk Bekerja (EPR) terhadap Total Penduduk Usia Kerja, 2019-2022	26
4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2021-2022	30
5 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2021-2022	33
6 Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama	35
7 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Penggunaan Waktu, 2020-2022	37
8 Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Tahun 2022	39
9 Jumlah dan Persentase Pekerja Formal dan Informal, 2020-2022	43
10 Indikator Pengangguran Papua, 2020-2022	48
11 Indikator Pengangguran Usia Muda di Provinsi Papua, 2020-2021	53
12 Indikator Setengah Penganggur, 2020-2022	59
13 Indikator Ketidaktifan, 2020-2022	61
14 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Agustus 2020-2022	70
15 Rata-rata Upah/Gaji Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan (juta rupiah), 2020-2022	77

DAFTAR GRAFIK

Gambar		Halaman
1	Pola TPAK Menurut Kelompok Umur, 2021-2022	23
2	TPAK Menurut Kabupaten/Kota, 2022	24
3	Pola Rasio Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2021-2022	27
4	Rasio Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2022	29
5	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022	34
6	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2022	38
7	Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2022	41
8	Persentase Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota, 2022	44
9	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, 2022	51
10	Pola Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022	64
11	Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Agustus 2022	71
12	Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, Agustus 2022	73
13	Rata-rata Upah/Gaji Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2022	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2022	89
2 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur, 2020-2022	90
3 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022	91
4 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2020-2022	92
5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022	93
6 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022	94
7 Ratio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022	95
8 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2022	96
9 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022	97
10 Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2022	98
11 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2022	99
12 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2022 (lanjutan)	100
13 Jumlah dan Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal, 2022	101
14 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022	102
15 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2022	103
16 Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2022	104
17 Persentase Setengah Penganggur Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2022	105
18 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2022	106
19 Tingkat Ketidaktifan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2022	107
20 Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2022	108

BAB 1

"PASAR TENAGA KERJA:
ANALISI MENURUT KILM"

Jumlah penduduk usia
kerja di Provinsi Papua
pada **2022** mencapai

2,56 juta orang



PASAR TENAGA KERJA: ANALISIS MENURUT KILM

"The ninth edition of the KILM strengthens the ILO's efforts to support measurement of national progress towards the new SDG of promoting sustained, inclusive, and sustainable economic growth, full and productive employment, and decent work for all"

1. Pendahuluan

Proses pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditandai oleh perubahan atau pergeseran pada struktur permintaan dan penawaran barang dan jasa yang diproduksi, tetapi juga ditandai oleh perubahan struktur kependudukan dan ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari pergeseran peran sektor pertanian (meskipun masih mendominasi) ke sektor industri dan perdagangan dalam struktur perekonomian Indonesia. Pergeseran peran sektor ini juga terlihat dari semakin menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian dibandingkan dua dekade lalu.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa di tengah perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh hingga mencapai 5,31 persen di tahun 2022. Tidak hanya itu, dari struktur kependudukan, Indonesia ditopang oleh usia produktif yang melimpah, yang dapat dimanfaatkan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian, permasalahan ketenagakerjaan masih tetap ada, seperti penggunaan tenaga kerja yang tidak efisien, maupun defisit pekerjaan layak.

Sebagai langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan kebijakan berbasis data yang komprehensif, mencakup pengumpulan, pengorganisasian dan analisis komprehensif informasi pasar tenaga kerja. Dalam hal ini, *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) dapat berfungsi sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi permasalahan fungsi pasar tenaga kerja.

Publikasi ini bertujuan untuk menyajikan analisis indikator pasar tenaga kerja secara khusus di Provinsi Papua. Analisis yang digunakan dalam publikasi ini mengadopsi *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) yang dibangun oleh *International Labour Office* (ILO) sejak tahun 1999. KILM disusun untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin serta meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Publikasi ini merujuk KILM edisi kesembilan yang diterbitkan ILO pada tahun 2015.

2. Peran Sakernas Dalam Indikator Pasar Tenaga Kerja

Sumber data ketenagakerjaan di Indonesia berasal dari sensus dan survei yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di antaranya adalah Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Meskipun demikian, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Secara umum, pengumpulan data melalui Sakernas bertujuan untuk menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran, dan penduduk yang pernah berhenti/ pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Sejak tahun 2015, Sakernas dilaksanakan secara semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Indonesia. Adapun jumlah sampel Sakernas Agustus 2021 sebesar 300.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sementara, di bulan Februari sampel rumah tangga yang diwawancarai lebih sedikit daripada jumlah sampel di bulan Agustus. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tujuan pengumpulan data dari sisi level estimasi atau penyajian indikator. Hasil Sakernas Februari ditujukan untuk penyajian data ketenagakerjaan hingga level provinsi, sedangkan hasil Sakernas Agustus ditujukan untuk estimasi hingga level kabupaten/kota. Sementara itu, jumlah sampel di Provinsi Papua pada bulan Agustus 2021 sebesar 11.040 rumah tangga yang tersebar di 29 kabupaten/kota.

Dari setiap rumah tangga terpilih, dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, seperti nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, bulan dan tahun lahir, serta umur. Selanjutnya, pada anggota rumah tangga yang berumur lima tahun ke atas, dikumpulkan informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), status perkawinan, partisipasi sekolah, pendidikan dan pelatihan, tempat tinggal lima tahun yang lalu, disabilitas, kegiatan bekerja seminggu terakhir, pekerjaan utama, kegiatan mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha baru, pengalaman kerja serta kegiatan lainnya.

3. Mengetahui KILM

Setiap organisasi, baik institusi maupun pemerintah yang berwenang dalam penyusunan strategi dan kebijakan ketenagakerjaan, membutuhkan data yang relevan dalam rangka monitoring kegiatan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Menyadari hal tersebut, *International Labour Office* (ILO) meluncurkan program *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) di tahun 1999 yang dirancang untuk memenuhi dua tujuan yaitu: (1) menghadirkan satu set indikator-indikator inti pasar tenaga kerja; dan (2) meningkatkan kemampuan indikator-indikator tersebut dalam mengevaluasi tren baru ketenagakerjaan. Adapun kriteria yang digunakan dalam memilih indikator inti tersebut yaitu: relevansi konseptual, ketersediaan data, perbandingan relatif antar wilayah atau negara. Sejak edisi pertama, desain dan penyajian indikator-indikator inti telah berkembang secara bertahap.

Edisi kesembilan KILM dirancang untuk memperkuat usaha-usaha dalam mengukur kemajuan pembangunan menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu “untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua”. KILM juga memberikan informasi berharga tentang indikator-indikator SDGs terkait lapangan kerja dan pasar tenaga kerja. Dengan demikian, KILM dapat menjadi sumber data yang dapat membantu pemerintah maupun swasta dalam melakukan analisis ketenagakerjaan yang dibutuhkan dalam evaluasi dan monitoring pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Terdapat 17 indikator yang disusun oleh ILO yang dikelompokkan ke dalam delapan kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama), KILM 5 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama), KILM 6 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 7 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja), dan KILM 8 (Penduduk yang Bekerja di Kegiatan Informal);
3. Indikator pengangguran dan setengah penganggur (underemployment), yang terdiri dari KILM 9 (Pengangguran), KILM 10 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 11 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 12 (Setengah Pengangguran/ underemployment);
4. Indikator bukan angkatan kerja (ketidakaktifan), yang terdiri dari KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
5. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
6. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Upah dan Biaya Kompensasi);
7. Produktivitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 16 (Produktivitas Tenaga Kerja);
8. Indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 17 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

Selanjutnya, penjelasan masing-masing indikator pada KILM adalah sebagai berikut:

KILM 1: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat secara aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Sementara rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dapat memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

Secara umum, indikator ini bermanfaat sebagai indikasi besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk umur kerja.

KILM 2: Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (Employment to Population Ratio-EPR)

Indikator ini didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara/ wilayah yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk suatu negara/ wilayah adalah bekerja. Sebaliknya, nilai rasio yang rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut Bukan Angkatan Kerja.

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi wilayah untuk menciptakan lapangan kerja. Indikator ini dianggap lebih mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibanding tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan layak atau tingkat defisit pekerjaan layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan nilai rasio bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif, misalnya pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda memilih bekerja. Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau

ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/ wilayah.

KILM 3: Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Selama bertahun-tahun dengan ditunjang oleh kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai), dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi di sektor pertanian. Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara/ wilayah.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas di antaranya adalah: berusaha sendiri; berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar; berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar; buruh/karyawan/pegawai; pekerja bebas di pertanian; pekerja bebas di non pertanian; dan pekerja keluarga/ tak dibayar.

KILM 4: Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa. Sementara dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi lapangan pekerjaan disajikan dalam 17 kategori, dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Adapun 17 kategori tersebut adalah sebagai berikut.

- A. Pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- B. Pertambangan dan penggalian;
- C. Industri pengolahan;

- D. Pengadaan listrik dan gas uap/ air panas dan udara dingin;
- E. Treatment air, treatment air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- H. Pengangkutan dan pergudangan;
- I. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
- J. Informasi dan komunikasi;
- K. Aktivitas keuangan dan asuransi;
- L. Real estat;
- M, N. Jasa Perusahaan
- O. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- P. Pendidikan;
- Q. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
- R, S, T, U. Jasa lainnya

KILM 5: Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Klasifikasi jenis pekerjaan menggunakan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014 yang mengacu pada ISCO 2008 dengan uraian jenis pekerjaan yang lebih rinci. Adapun kategori KBJI yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut.

- 0/1. Tenaga profesional, teknisi, dan yang sejenisnya;
- 2. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan;
- 3. Tenaga tata usaha dan yang sejenisnya;
- 4. Tenaga usaha penjualan;
- 5. Tenaga usaha jasa;
- 6. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 7/8/9. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar;
- X/00. Lainnya

KILM 6: Pekerja Paruh Waktu

Mengukur tingkat dan tren jam bekerja pada berbagai kelompok penduduk bekerja dan pekerja individu menjadi penting ketika akan melakukan

pemantauan kerja dan kondisi hidup pekerja, maupun dalam melakukan analisis perkembangan ekonomi. indikator pekerja paruh waktu pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Oleh karena tidak adanya definisi yang disepakati secara internasional terkait jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Dengan demikian untuk indikator pekerja paruh waktu digunakan batas kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 7: Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya). Adapun pengkategorian jumlah jam kerja biasanya adalah: 0 jam; 1-34 jam; 35-48 jam; dan 49 jam ke atas.

KILM 8: Penduduk yang Bekerja di Kegiatan Informal

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan, atau dalam praktiknya tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dan sebagainya). Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan perorangan, karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Sayangnya, BPS belum dapat menyajikan data pekerja sektor informal dengan mengacu pada ICLS ke-17 karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas. Saat ini, BPS menentukan penduduk yang bekerja di kegiatan informal/ formal berdasarkan status dalam pekerjaan utama. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mencakup status berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sisanya termasuk pekerja informal.

KILM 9: Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak dapat diartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang pencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Denominator atau faktor pembagi dalam hal ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah penduduk. Hal ini perlu ditekankan karena istilah angkatan kerja dan bekerja tidak selalu dipahami publik. Misalnya, tingkat pengangguran di suatu wilayah sebesar enam persen. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat enam persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 10: Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (1) tidak memiliki pekerjaan; (2) secara aktif mencari pekerjaan; (3) bersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup mereka yang berumur 15-24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai mereka yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 11: Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, namun tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, indikator ini tidak dapat ditampilkan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 12: Setengah Penganggur (Underemployment)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

1. Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak;
2. Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13: Tingkat Ketidaktifan

Tingkat ketidaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja di suatu wilayah yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidaktifan jika dijumlahkan dengan TPAK maka hasilnya adalah 100 persen. Dengan kata lain, tingkat ketidaktifan sama dengan satu dikurang TPAK ($1 - \text{TPAK}$).

KILM 14: Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu: tidak pernah bersekolah; tingkat pra dasar; tingkat dasar; tingkat menengah; dan tingkat tinggi. Dalam publikasi ini, tingkat pendidikan dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu: tidak pernah bersekolah; tingkat dasar; tingkat menengah; dan tingkat tinggi.

KILM 15: Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja

Indikator ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja menurut indeks upah pada sektor ini. Salah satu keterbatasan variabel dalam Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan sebulan terakhir pada status pekerjaan tertentu. Dengan demikian, publikasi ini hanya dapat menyajikan rata-rata upah/pendapatan

sebulan terakhir buruh/karyawan/pegawai. Biaya kompensasi tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 16: Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi berperan dalam proses produksi. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga dapat menunjukkan sektor mana saja yang memiliki produktivitas tenaga kerja yang tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini dapat memberikan gambaran sektor padat karya dan sektor padat modal. Namun, karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas, maka indikator ini tidak dapat disajikan dalam publikasi ini.

KILM 17: Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak dikumpulkan dalam Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga diperlukan untuk melengkapi analisis ini. Oleh karenanya, indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

4. Peran KILM dalam Analisis Indikator Pasar Tenaga Kerja

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi dalam pasar tenaga kerja seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk memenuhi hal tersebut, maka dibutuhkan pengumpulan data ketenagakerjaan yang lengkap, terorganisasi, dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal terkait fungsi pasar tenaga kerja.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja, sebagaimana yang dikutip dalam publikasi edisi kesembilan KILM adalah sebagai berikut:

KILM dirancang untuk memperkuat usaha-usaha dalam mengukur kemajuan pembangunan menuju Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu “untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua”

(1) Mempromosikan agenda ILO: pekerjaan layak (*decent work*)

Sebagaimana salah satu tujuan agenda ILO yaitu mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Untuk mengetahui kualitas pekerjaan sehingga disebut “layak” dapat diidentifikasi menggunakan pendekatan, misalnya mengidentifikasi individu yang masuk dalam penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan utama, lapangan pekerjaan utama, dan jenis pekerjaan utama (KILM 3, KILM 4, dan KILM 5); jam kerja yang berlebih pada indikator penduduk bekerja menurut jumlah jam kerja (KILM 7); penduduk bekerja di kegiatan informal (KILM 8); dan setengah pengangguran (KILM 12).

Selain itu, permasalahan dalam dunia ketenagakerjaan yang sering muncul adalah kurangnya kesempatan kerja. Isu ini dapat diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 9, 10, dan 12), atau juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan dari indikator bukan angkatan kerja (KILM 13).

(2) Pemantauan pencapaian tujuan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dengan berakhirnya *Millennium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, serangkaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) telah disepakati untuk menggantikannya. Dalam konteks SDGs, pekerjaan penuh dan layak untuk semua dijabarkan

pada tujuan kedelapan yaitu “mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja, dan pekerjaan layak untuk semua”.

KILM menyajikan statistik untuk beberapa indikator yang diusulkan dalam SDGs, yaitu PDB per kapita dan pertumbuhan PDB, pekerja informal di sektor non pertanian, rasio lapangan kerja terhadap penduduk, tingkat pengangguran, pengangguran kelompok umur muda, penduduk muda yang tidak bersekolah, pelatihan, yang bersesuaian dengan KILM A1, 8, 2b, 9b, 10b, dan 10c. Selanjutnya, KILM juga memberikan informasi berharga tentang indikator yang relevan untuk memantau SDGs lainnya yang terkait ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja, seperti statistik kemiskinan dan distribusi pendapatan (KILM 18), yang dapat digunakan untuk mengukur tujuan SDGs yang pertama, yaitu “mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk, di mana saja”.

(3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja

Perempuan menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan layak. Sebagian besar indikator KILM diagregasi menurut jenis kelamin, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

(4) Melakukan kajian tenaga kerja di era globalisasi

Era globalisasi berpotensi dalam memberikan manfaat bagi semua, namun hingga saat ini belum semua merasakan hal yang sama. Oleh karenanya, diperlukan cara untuk menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satunya adalah dengan menempatkan tenaga kerja sebagai tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro maupun sosial.

Dalam hal ini, KILM bermanfaat sebagai alat monitoring dinamika ketenagakerjaan terkait globalisasi. Sebagai contoh, dalam satu penelitian menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/ penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

(5) Mengidentifikasi “best practice”

KILM dapat membantu negara dalam mengidentifikasi “best practice” dari isu-isu ketenagakerjaan di berbagai negara, seperti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, keterbatasan kelompok pekerja muda untuk mengakses pekerjaan-pekerjaan tertentu, keseimbangan produktivitas tenaga kerja dan upah, pengangguran, peluang kerja, dan berbagai isu lainnya. Dengan mengidentifikasi kebijakan berbagai negara atas setiap isu, maka dapat diperoleh “best practice” yang dapat diterapkan di negara lainnya.

5. Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dalam lima bagian. Bagian pertama menyajikan gambaran umum pasar tenaga kerja dan bagaimana KILM dimanfaatkan dalam analisis pasar tenaga kerja di Indonesia. Bagian kedua menyajikan analisis partisipasi angkatan kerja dan penduduk bekerja di Provinsi Papua. Bagian ini terdiri dari delapan sub bagian, yang dibagi menurut delapan indikator KILM terkait partisipasi angkatan kerja dan penduduk bekerja. Selanjutnya, bagian ketiga membahas indikator KILM terkait pengangguran di Papua. Bagian keempat adalah pembahasan KILM 14 yaitu pencapaian pendidikan dan melek huruf penduduk bekerja di Papua. Bagian terakhir dari publikasi ini adalah pembahasan terkait indikator upah dan biaya tenaga kerja.

BAB 2

“PARTISIPASI ANGKATAN
KERJA DAN PENDUDUK
BEKERJA”

Dibandingkan dengan
tahun 2021, **TPAK** pada
tahun **2022** mengalami
penurunan sebesar

0.54%



PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN PENDUDUK KERJA

"Pleasure in the job puts perfection in the work."

- Aristotle

1. KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Informasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat memberikan gambaran distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi.

Secara matematis, indikator ini didefinisikan sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran. Sementara penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ditentukan untuk mengukur karakteristik ekonomi.

Tabel 1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja 2022

Jenis Kelamin	Penduduk ≥15 tahun	Angkatan Kerja	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
TOTAL	2.560.749	1.991.097	77,75
Laki-laki	1.353.179	1.156.801	85,49
Perempuan	1.207.570	834.296	69,09

Sumber: Sakernas Agustus 2022

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Provinsi Papua pada tahun 2022 mencapai 2,56 juta orang. Jumlah penduduk usia kerja laki-laki lebih tinggi (52,84 persen) dibandingkan perempuan (47,16 persen). Dari total penduduk usia kerja tersebut, sebanyak 1,99 juta orang masuk ke dalam angkatan kerja yaitu bekerja dan pengangguran, di mana jumlah angkatan kerja laki-laki lebih banyak daripada angkatan kerja perempuan.

Dari gambaran tersebut maka TPAK Papua pada tahun tersebut mencapai 77,75 persen, atau dengan kata lain dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebesar 77-78 orang masuk sebagai angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja ataupun menganggur. Menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi (85,49 persen) dibandingkan perempuan sebesar 69,09 persen. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa perempuan lebih banyak terlibat dalam kegiatan bukan angkatan kerja seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, ataupun kegiatan lainnya selain bekerja.

Tabel selanjutnya menunjukkan capaian TPAK Provinsi Papua pada kurun waktu 2019-2022 menurut berbagai karakteristik demografi diantaranya adalah jenis kelamin, tempat tinggal, maupun kelompok umur.

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sakernas Tahun 2019 - 2022

Karakteristik	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Total	76,93	72,16	78,29	77,75
Laki-Laki	85,99	79,84	86,41	85,49
Perempuan	66,72	63,47	69,10	69,09
Perkotaan	64,40	64,27	67,34	64,03
Perdesaan	82,15	75,52	84,03	83,71
(15-64)	78,09	73,00	79,63	78,97
Laki-Laki	87,46	80,55	86,41	86,80
Perempuan	67,62	64,49	69,10	70,27
Perkotaan	66,32	65,40	67,34	66,07
Perdesaan	82,86	76,14	84,74	84,39
(15-24)	54,34	51,60	54,61	57,52
Laki-Laki	58,94	55,34	60,40	61,45
Perempuan	49,38	47,47	48,27	53,40
Perkotaan	38,82	34,66	36,06	38,89
Perdesaan	60,84	58,87	62,75	65,07
(25-54)	84,75	77,99	88,35	87,53
Laki-Laki	94,95	86,61	96,83	96,59
Perempuan	86,20	80,50	78,85	77,36
Perkotaan	77,39	77,23	79,18	76,65
Perdesaan	90,63	81,20	91,85	91,88
(25-34)	86,10	79,59	85,89	85,62
Laki-Laki	96,79	89,01	94,85	94,90

Karakteristik	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perempuan	74,66	69,56	76,21	75,67
Perkotaan	77,03	75,18	75,96	74,33
Perdesaan	89,63	81,30	89,74	90,30
(35-54)	76,71	70,83	89,87	88,69
Laki-Laki	98,38	88,82	98,02	97,59
Perempuan	75,26	70,79	80,54	78,42
Perkotaan	77,63	78,55	81,21	78,12
Perdesaan	91,26	81,13	93,15	92,82
(55-64)	74,98	75,74	79,46	77,10
Laki-Laki	85,30	83,26	80,20	84,71
Perempuan	61,62	65,93	57,63	68,03
Perkotaan	63,41	64,64	67,94	65,92
Perdesaan	81,53	82,15	86,40	83,70
65 Tahun Ke Atas	47,37	51,09	48,62	53,89
Laki-Laki	51,82	62,76	59,72	61,68
Perempuan	41,32	36,66	35,01	43,54
Perkotaan	32,94	46,11	32,06	36,89
Perdesaan	59,02	55,29	63,01	67,05

Sumber: Sakernas 2019-2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2022, TPAK di Provinsi Papua cukup berfluktuasi. Di tahun 2019, TPAK Papua mencapai 76,93 persen, turun cukup drastis sebesar 4,77 persen menjadi 72,16 persen pada tahun 2020. Penurunan partisipasi angkatan kerja di tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang turut dirasakan di provinsi ini. Meskipun demikian, di tahun 2021, TPAK menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan mencapai 78,29 persen, selanjutnya sedikit mengalami penurunan di tahun 2022, yaitu mencapai 77,75 persen.

Selama kurun waktu tersebut, partisipasi angkatan kerja laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan. Menariknya, saat terjadi pandemi di tahun 2020, selisih partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan lebih kecil dibandingkan periode lainnya. Sebagaimana yang terlihat pada tabel tersebut, selisih TPAK laki-laki dan perempuan di tahun tersebut sebesar 16,37 persen. Sementara itu pada periode lainnya, perbedaan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan berada di antara rentang 17 hingga 19

persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi tidak terlalu berdampak pada partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi aktif di Papua.

Selanjutnya, apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPAK daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada perdesaan. Selama periode 2019-2022, TPAK perkotaan maupun perdesaan bergerak cukup stabil, di mana pada tahun 2022, TPAK perkotaan sebesar

“Menariknya, saat terjadi pandemi di tahun 2020, selisih partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan lebih kecil dibandingkan periode lainnya”

64,03 persen sedangkan TPAK perdesaan mencapai 83,71 persen. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa pandemi Covid-19 tidak terlalu berdampak pada partisipasi kerja penduduk di perkotaan. Di tahun 2020, TPAK perkotaan sebesar 64,27 persen atau turun hanya sekitar 0,13 persen. Sebaliknya di daerah perdesaan, penurunan partisipasi angkatan kerja di tahun tersebut mencapai 6,63 persen.

Tabel 2 juga menyajikan capaian TPAK menurut beberapa kelompok umur. Partisipasi angkatan kerja pada kelompok usia 35-54 tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya yang disajikan pada tabel tersebut. Pada tahun 2022, TPAK 35-54 tahun mencapai 88,69 persen, turun sebesar 1,18 persen dibanding tahun sebelumnya. Di urutan kedua yaitu pada kelompok usia 25-54 tahun yaitu sebesar 87,53 persen, dan kelompok usia 15-64 tahun sebesar 78,97 persen. Sebaliknya, TPAK terendah berada pada kelompok usia 65 tahun ke atas (53,89 persen) dan kelompok penduduk 15-24 tahun yaitu sebesar 57,52 persen.

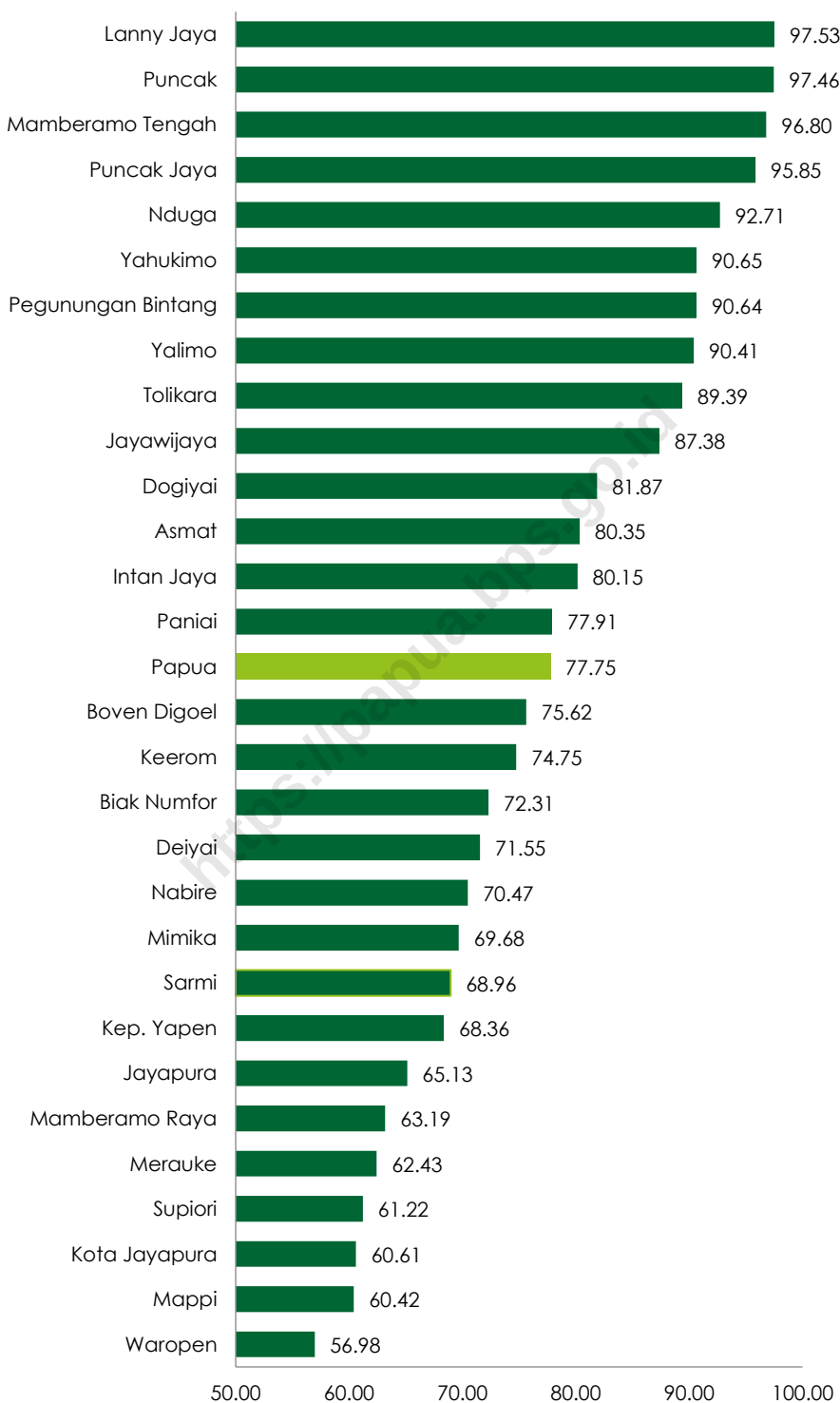
Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi angkatan kerja di Papua pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) lebih tinggi daripada kelompok penduduk usia tidak produktif, yaitu kelompok penduduk berusia 65 tahun ke atas dan kelompok umur 15-24 tahun. Hal ini dapat disebabkan karena kelompok penduduk 65 tahun ke atas merupakan penduduk lansia yang telah mengalami penurunan produktivitas, dan sulit untuk masuk dalam kegiatan ekonomi formal. Sementara kelompok usia 15-24 tahun merupakan usia sekolah, sehingga masuk ke dalam kategori bukan angkatan kerja.

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pada kelompok usia yang lebih tinggi, selisih partisipasi kerja laki-laki dan perempuan semakin besar. Seperti pada kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas), selisih TPAK laki-laki dan perempuan pada tahun 2022 mencapai 18 persen. Hal ini dapat disebabkan karena secara fisik perempuan lebih lemah daripada laki-laki sehingga mempengaruhi keputusan perempuan untuk masuk dalam kegiatan ekonomi aktif. Selain itu, di Indonesia pada umumnya dan Papua pada khususnya, tanggung jawab ekonomi keluarga masih berada di pundak laki-laki.



Gambar 1. Pola TPAK Menurut Kelompok Umur, 2021-2022

Gambar di atas menunjukkan pola partisipasi angkatan kerja di Provinsi Papua menurut kelompok umur di tahun 2022. Secara umum, tidak terlihat perbedaan pola TPAK menurut kelompok umur pada periode 2021 hingga 2022. Partisipasi angkatan kerja pada kelompok usia muda, yaitu 15-19 tahun terlihat rendah, yaitu sebesar 41,65 persen, meskipun mengalami peningkatan sebesar 2,71 persen dibandingkan tahun 2021. TPAK semakin meningkat seiring dengan peningkatan umur penduduk, namun kemudian mengalami penurunan mulai pada kelompok umur 45 tahun. Hingga pada kelompok usia 65 tahun ke atas, partisipasi angkatan kerja di tahun 2022 mencapai sekitar 54 persen. Puncak partisipasi angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi aktif di provinsi ini berada pada kelompok umur 40-44 tahun. Di tahun 2022, TPAK kelompok usia 40-44 tahun mencapai 90,52 persen, turun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 2. TPAK Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Gambar selanjutnya menunjukkan capaian TPAK menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua pada Agustus 2022. Batang yang berwarna lebih terang adalah TPAK Provinsi Papua. Untuk lebih memudahkan pengamatan, tingkat partisipasi diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar.

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa partisipasi angkatan kerja di wilayah pegunungan pada umumnya lebih tinggi dibandingkan di wilayah pesisir. Partisipasi angkatan kerja tertinggi berada di Kabupaten Lanny Jaya, yaitu mencapai 97,53 persen, disusul oleh Kabupaten Puncak (97,46 persen), dan Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar 96,80 persen. Sementara itu, TPAK terendah berada di Kabupaten Waropen (56,98 persen), diikuti oleh Kabupaten Mappi (60,42 persen), dan Kota Jayapura sebesar 60,61 persen, yang semuanya merupakan kabupaten yang terletak di wilayah pesisir.

2. KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja

Rasio pekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio/EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya pilihan pendidikan

yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun modal manusia mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/ membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu wilayah.

Tabel 3 Rasio Penduduk Bekerja (EPR) terhadap Total Penduduk Usia Kerja, 2019-2022

Kelompok Umur	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EPR Penduduk 15 +	74,23	69,07	75,69	75,55
Laki-laki	83,03	76,01	83,17	82,63
Perempuan	64,31	61,22	67,21	67,62
Perkotaan	58,76	58,51	60,70	59,53
Perdesaan	80,68	73,56	82,27	82,51
EPR Penduduk 15-24	48,97	46,65	49,06	52,31
Laki-laki	52,40	49,44	53,26	54,46
Perempuan	45,29	43,59	44,46	50,06
Perkotaan	28,88	26,21	27,11	28,87
Perdesaan	57,40	55,43	62,75	61,82
EPR Penduduk 25 +	81,66	75,57	83,23	82,67
Laki-laki	91,79	83,57	91,47	90,91
Perempuan	70,08	66,42	73,80	73,25
Perkotaan	67,60	67,95	69,98	68,35
Perdesaan	87,51	78,79	88,90	89,02

Sumber: Sakernas 2018-2022, data diolah

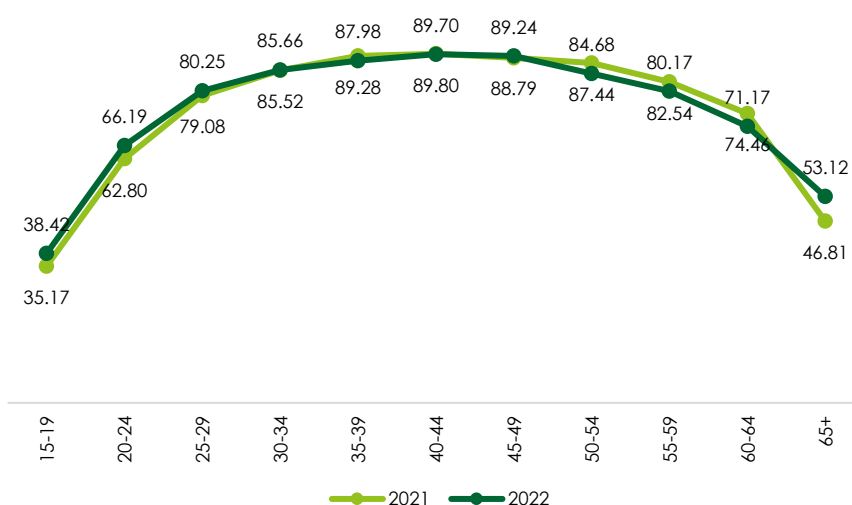
Proporsi penduduk bekerja terhadap seluruh penduduk usia kerja di Provinsi Papua pada kurun waktu 2019-2022 cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Data Sakernas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, proporsi penduduk yang bekerja di Papua mencapai 75,55 persen terhadap total penduduk usia kerja. Dengan kata lain, dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas di Papua, terdapat 75-76 orang yang bekerja. Proporsi ini terlihat lebih tinggi untuk

penduduk laki-laki (82,63 persen) dibandingkan perempuan, yaitu sebesar 67,62 persen.

Menurut daerah tempat tinggal, nilai EPR daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan selama kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, dari 100 penduduk usia kerja di perdesaan terdapat 82 hingga 83 penduduk yang bekerja. Sementara di daerah perkotaan, hanya sekitar 59 hingga 60 penduduk yang bekerja.

Tabel 3 juga menyajikan proporsi penduduk bekerja menurut kelompok umur sekolah (15-24 tahun) dan kelompok bukan umur sekolah (25 tahun ke atas). Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa proporsi penduduk bekerja pada kelompok usia 25 tahun ke atas jauh lebih tinggi daripada kelompok usia sekolah, yaitu sebesar 82,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia muda tidak terlibat dalam pasar kerja tetapi masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja karena bersekolah.

Hal yang cukup menarik adalah selisih proporsi penduduk bekerja antara laki-laki dan perempuan pada dua kelompok usia tersebut. Pada kelompok usia sekolah, selisih EPR laki-laki dan perempuan sekitar empat persen, sedangkan pada kelompok usia 25 tahun ke atas, perbedaan terlihat cukup signifikan yaitu hampir mencapai 18 persen di tahun 2022.



Gambar 3. Pola Rasio Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, 2021-2022

Gambar 1.2 menunjukkan pola rasio penduduk bekerja menurut kelompok umur pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022. Dari gambar tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa tidak terlihat adanya perbedaan pola rasio penduduk bekerja pada setiap kelompok umur pada dua periode waktu tersebut.

Sejalan dengan pola TPAK, proporsi penduduk bekerja pada kelompok usia muda (15-19 tahun) paling kecil dibandingkan kelompok umur lainnya. Di tahun 2022, terdapat 38-39 orang dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Hal ini dikarenakan kelompok usia ini masih merupakan usia penduduk sekolah.

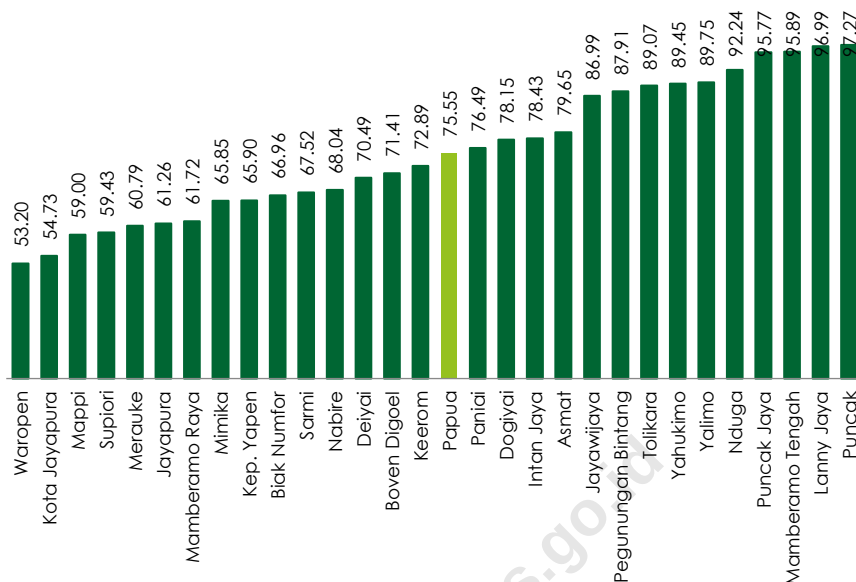
Proporsi penduduk bekerja semakin meningkat seiring dengan peningkatan umur, namun mulai usia 45 tahun proporsi penduduk bekerja terhadap total

"Proporsi penduduk bekerja semakin meningkat seiring dengan peningkatan umur, namun mulai usia 45 tahun proporsi penduduk bekerja terhadap total penduduk 15 tahun, semakin berkurang"

penduduk 15 tahun, semakin berkurang. Pada kelompok usia lanjut (di atas 65 tahun), terdapat sekitar 53 orang dari 100 penduduk usia kerja yang bekerja di Papua. Adapun puncak EPR tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun, yaitu

sebesar 89,70 persen. Jika dibandingkan tahun lalu, proporsi penduduk bekerja sedikit mengalami penurunan sebesar 0,1 persen.

Selanjutnya, Gambar 3 menunjukkan nilai EPR menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2022. Berdasarkan data Sakernas, terdapat 15 kabupaten/kota yang memiliki nilai EPR di bawah angka provinsi, sisanya sebanyak 14 kabupaten memiliki nilai EPR di atas rata-rata provinsi. Apabila diamati lebih lanjut, kabupaten-kabupaten yang memiliki nilai EPR di atas rata-rata provinsi merupakan kabupaten yang berada di wilayah pegunungan. Sebaliknya, kabupaten yang memiliki nilai EPR di bawah angka provinsi, berada di wilayah pesisir Papua.



Gambar 4. Rasio Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2022

Kabupaten Waropen merupakan kabupaten yang memiliki proporsi penduduk bekerja terhadap penduduk usia kerja. Pada Agustus 2022, terdapat 53-54 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di kabupaten ini. Rendahnya rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja adalah karena persentase penduduk pengangguran dan penduduk bukan angkatan kerja yang cukup tinggi. Sebaliknya, Kabupaten Puncak merupakan kabupaten dengan proporsi penduduk bekerja tertinggi di Provinsi Papua. Tahun 2022, dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Puncak, 97-98 di antaranya bekerja.

3. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi penduduk bekerja menurut status pekerjaan dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah pekerja yang digaji (buruh/ karyawan/pegawai) dan penurunan

jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Tabel 4. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2021-2022

Indikator	2021		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL	1.887.781	100,00	1.934.767	100,00
Buruh/karyawan/pegawai	353.598	18,73	296.534	15,33
Berusaha	922.966	48,89	994.505	51,40
Pekerja bebas	20.792	1,10	20.846	1,08
Pekerja keluarga	590.425	31,28	622.882	32,19
LAKI-LAKI	1.102.027	100,00	1.118.183	100,00
Buruh/karyawan/pegawai	251.834	22,85	216.291	19,34
Berusaha	696.499	63,20	733.557	65,60
Pekerja bebas	18.579	1,69	18.509	1,66
Pekerja keluarga	135.115	12,26	149.826	13,40
PEREMPUAN	785.754	100,00	816.584	100,00
Buruh/karyawan/pegawai	101.764	12,95	80.243	9,83
Berusaha	226.467	28,82	260.948	31,96
Pekerja bebas	2.213	0,28	2.337	0,29
Pekerja keluarga	455.310	57,95	473.056	57,93

Sumber: Sakernas 2021-2022, data diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja berstatus berusaha sendiri, baik berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh dibayar, maupun berusaha dibantu buruh tidak dibayar. Di tahun 2022, persentase pekerja berusaha sendiri mencapai 51,40 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, persentase berusaha sendiri mengalami kenaikan lebih dari dua persen. Di urutan selanjutnya adalah pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar, dengan persentase sebesar 32,19 persen. Pekerja keluarga juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai di Papua mengalami penurunan cukup besar yaitu mencapai lebih dari tiga persen. Di tahun ini, pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai sebesar 15,33 persen. Sejalan dengan itu, persentase pekerja yang berstatus sebagai pekerja bebas (pertanian dan non pertanian) sedikit mengalami penurunan, hingga di tahun 2022, persentase pekerja bebas di Papua hanya sebesar 1,08 persen.

Hasil Sakernas menunjukkan adanya perbedaan status pekerja antara pekerja laki-laki dan perempuan. Di tahun 2022, sebagian besar pekerja laki-laki merupakan pekerja yang berstatus sebagai berusaha (sendiri, dibantu buruh dibayar/ tak dibayar), yaitu mencapai sebesar 65,60 persen, naik

"Sebagian besar pekerja laki-laki berstatus sebagai berusaha (sendiri maupun dibantu) sedangkan pekerja perempuan sebagian besarnya adalah pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar"

sebesar 2,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, sebagian besar perempuan bekerja di Papua merupakan pekerja keluarga/ tak dibayar. Pekerja keluarga di sini biasanya adalah anggota keluarga yang membantu bekerja atau mendapatkan penghasilan tanpa dibayar, seperti membantu menggarap kebun atau menjaga kios, dll. Di tahun yang sama, persentase pekerja perempuan yang berstatus sebagai pekerja keluarga/ tak dibayar mencapai lebih dari 57 persen.

Dari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan di tahun 2022 terlihat sedikit mengalami kemunduran. Hal ini diindikasikan oleh berkurangnya jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan bertambahnya pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/ tak dibayar di Provinsi Papua. Meskipun demikian, gambaran tersebut hanya merupakan salah satu dari banyak indikator yang dapat digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan ketenagakerjaan di suatu wilayah.

4. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Informasi sektoral dapat digunakan untuk mengidentifikasi distribusi dan pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja cenderung berpindah dari pertanian dan aktifitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa. Dalam konteks ruang/spasial pekerja berpindah dari desa ke kota. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai peralihan aktivitas ekonomi dari yang bersifat tradisional ke aktivitas ekonomi modern.

Untuk kepentingan analisis, aktivitas sektor dalam perekonomian dibagi menjadi tiga sektor yaitu:

- a. Sektor primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan baku, melainkan mendayagunakan sumber-sumber alam yang ada, yang mencakup sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta sektor Pertambangan dan Penggalian;
- b. Sektor sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan baku, baik yang berasal dari sektor primer maupun sekunder itu sendiri menjadi barang lain yang lebih tinggi nilai gunanya. Sektor ini mencakup sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Konstruksi; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Real Estat; dan
- c. Sektor tersier, yaitu sektor yang tidak memproduksi dalam bentuk fisik namun dalam bentuk jasa. Sektor yang termasuk dalam sektor ini adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya.

Tabel 5. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2021-2022

Indikator	2021		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Primer	1.286.222	68,13	1.397.009	72,21
Sekunder	99.092	5,25	118.700	6,14
Tersier	502.467	26,62	419.058	21,66
TOTAL	1.887.781	100,00	1.934.767	100,00
Primer	709.422	64,37	769.398	68,81
Sekunder	85.077	7,72	82.270	7,36
Tersier	307.528	27,91	266.515	23,83
LAKI-LAKI	1.102.027	100,00	1.118.183	100,00
Primer	576.800	73,41	627.611	76,86
Sekunder	14.015	1,78	36.430	4,46
Tersier	194.939	24,81	152.543	18,68
PEREMPUAN	785.754	100,00	816.584	100,00

Sumber: Sakernas 2021-2022, data diolah

Lebih dari 70 persen penduduk di Papua bekerja di sektor primer yaitu sektor Pertanian dan Pertambangan. Di urutan kedua adalah sektor tersier (21,66

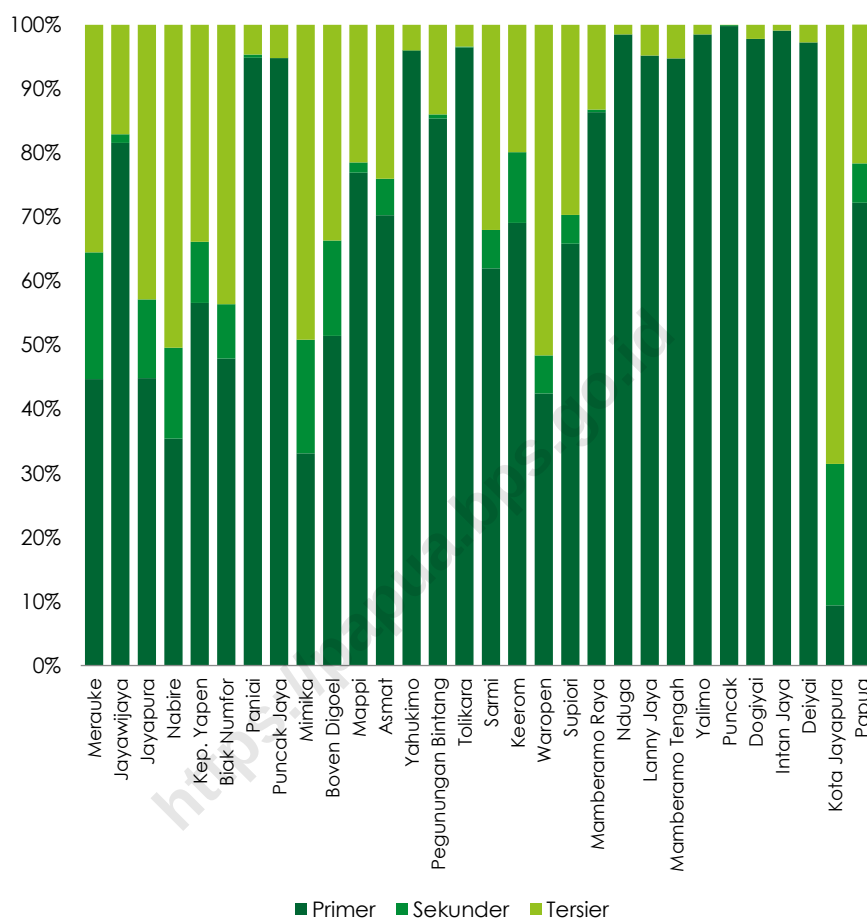
"Sektor primer masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Papua"

persen), dan sektor sekunder sebesar 6,14 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak terlihat adanya perbedaan pola

sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Hanya saja, terdapat penambahan pekerja di sektor primer pada tahun 2022 sebesar 4,08 persen.

Apabila dilihat menurut jenis kelamin, juga tidak terlihat adanya perbedaan komposisi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar, meskipun persentase pekerja perempuan yang bekerja di sektor primer cenderung lebih banyak daripada laki-laki. Tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 76-77 pekerja perempuan yang bekerja di sektor primer, sedangkan pekerja laki-laki sekitar 68-69 orang. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat

peningkatan persentase pekerja di sektor primer, baik laki-laki maupun perempuan.



Gambar 5. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022

Menurut wilayah, sektor primer (Pertanian) masih mendominasi struktur ketenagakerjaan hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua. Meskipun demikian, terlihat ada perbedaan dominasi sektor primer terhadap struktur ketenagakerjaan di Kota Jayapura. Di ibu kota provinsi ini, sektor tersier merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja (69 persen), sedangkan sektor primer hanya mampu menyerap sekitar sembilan persen tenaga kerja yang tersedia.

5. KILM 5. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Data Sakernas Agustus 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Provinsi Papua merupakan pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan, mencapai 68,35 persen atau sebesar 1,32 juta orang. Di urutan kedua adalah tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan (161,08 ribu orang), dan pekerja kasar yang mencapai 111,30 ribu orang atau sekitar enam persen dari total penduduk bekerja. Sementara itu, TNI dan Polri menempati urutan terakhir dengan persentase sebesar 0,73 persen.

Tabel 6. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Jenis/Jabatan Pekerjaan	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
TNI dan POLRI	12.166	2.053	14.219
Manajer	35.162	20.160	55.322
Profesional	37.501	22.062	59.563
Teknisi dan Asisten Profesional	25.307	11.967	37.274
Tenaga Tata Usaha	43.378	23.658	67.036
Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan	120.815	40.268	161.083
Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	61.604	1.260.720	1.322.324
Pekerja Pengolahan dan Kerajinan, dan Ybdi	22.835	13.870	36.705
Operator dan Perakit Mesin	50.951	18.990	69.941
Pekerja Kasar	51.620	59.680	111.300
Total	461.339	1.473.428	1.934.767

Jenis/Jabatan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
TNI dan POLRI	13.910	309	14.219
Manajer	35.905	19.417	55.322
Profesional	27.677	31.886	59.563
Teknisi dan Asisten Profesional	27.210	10.064	37.274
Tenaga Tata Usaha	49.347	17.689	67.036

Jenis/Jabatan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tenaga Usaha Jasa dan Tenaga Penjualan	67.074	94.009	161.083
Pekerja Terampil Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	721.715	600.609	1.322.324
Pekerja Pengolahan dan Kerajinan, dan Ybdi	26.802	9.903	36.705
Operator dan Perakit Mesin	68.395	1.546	69.941
Pekerja Kasar	80.148	31.152	111.300
Total	1.118.183	816.584	1.934.767

Sumber: Sakernas Agustus 2021, data diolah

Terlihat ada perbedaan jenis atau jabatan pekerjaan pekerja di perkotaan dan perdesaan. Di kota, jenis pekerjaan yang paling banyak ditekuni oleh penduduk bekerja adalah sebagai tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan (26,19 persen) sedangkan di perdesaan adalah sebagai pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2022, persentase pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan di daerah perdesaan mencapai 85,56 persen.

Menurut jenis kelamin, tidak terlihat adanya perbedaan jenis pekerjaan yang mendominasi antara laki-laki dan perempuan. Di tahun 2022, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja sebagai pekerja terampil pertanian, kehutanan, dan perikanan, masing-masing sebesar 721,72 ribu orang dan 600,61 orang.

6. KILM 6. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja serta pada tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok pekerja dan untuk pekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, yang merupakan proporsi dari total pekerja. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah bekerja kurang dari 35 jam seminggu.

Tabel 7. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Penggunaan Waktu, 2020-2022

INDIKATOR	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk yang Bekerja	1.691.745	1.887.781	1.934.767
Laki-laki	988.727	1.102.027	1.118.183
Perempuan	703.018	785.754	816.584
Perkotaan	427.370	453.360	461.339
Perdesaan	1.264.375	1.434.421	1.473.428
Jumlah Pekerja Paruh Waktu	849.225	863.332	763.377
Laki-laki	452.213	448.020	380.377
Perempuan	397.012	415.312	383.000
Perkotaan	122.040	123.515	81.578
Perdesaan	727.185	739.817	681.799
Tingkat Pekerja Paruh Waktu (%)	50,20	45,73	39,46
Laki-laki	45,74	51,89	49,83
Perempuan	56,47	48,11	50,17
Perkotaan	28,56	14,31	10,69
Perdesaan	57,51	85,69	89,31
<i>Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu</i>	<i>56,47</i>	<i>48,11</i>	<i>50,17</i>

Sumber: Sakernas 2020-2022, diolah

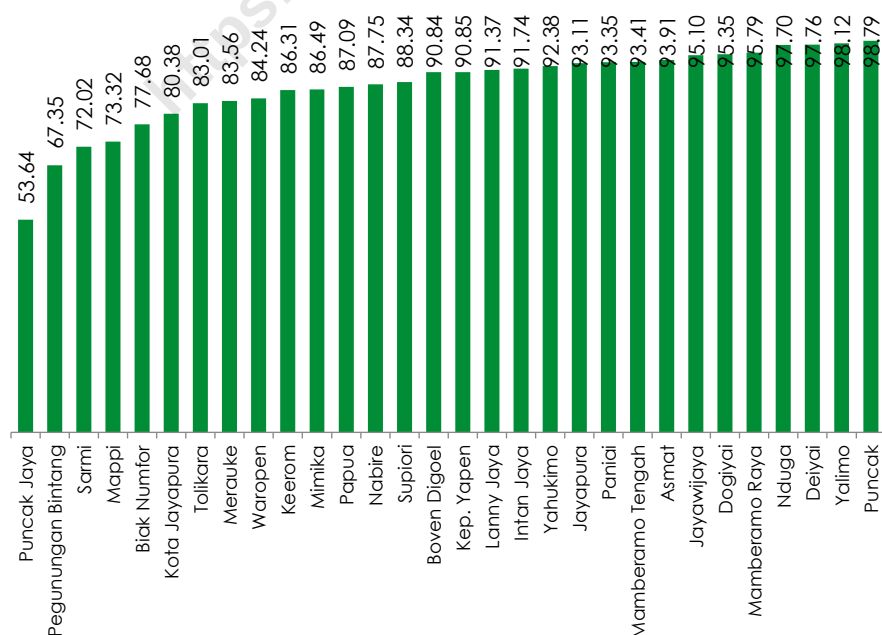
Pekerja paruh waktu didefinisikan sebagai mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Dahulu, konsep pekerja paruh waktu dikenal sebagai setengah pengangguran sukarela. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2022, jumlah pekerja paruh waktu di Papua mencapai 736,38 ribu orang, atau sekitar 39 persen dari total persentase pekerja tidak penuh di Papua. Dibandingkan periode sebelumnya, terjadi penurunan jumlah pekerja paruh waktu di Provinsi Papua pada tahun 2022.

Sementara itu, Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah pekerja paruh waktu di perdesaan jauh lebih tinggi daripada di perkotaan. Di perdesaan, sekitar 681,80

ribu orang yang merasa sudah cukup dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Sebaliknya, hanya terdapat sekitar 81,58 ribu orang di perkotaan yang sudah merasa cukup dengan pekerjaan sekarang, sehingga tidak mencari pekerjaan lagi. Hal ini terlihat dari tingginya persentase pekerja waktu di perdesaan (89,31 persen) dibandingkan perkotaan sebesar 10,69 persen. Pola ini terlihat sama dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu lebih tinggi daripada laki-laki. Di tahun 2022, *share* perempuan terhadap total pekerja paruh waktu di Papua mencapai 50,17 persen, sedangkan laki-laki sebesar 49,83 persen.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terlihat adanya perbedaan pola antara laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Meskipun demikian, secara umum persentase perempuan sebagai pekerja paruh waktu lebih tinggi daripada laki-laki. Jika dikaitkan dengan status pekerjaan, hal ini dapat disebabkan karena mayoritas pekerja perempuan merupakan pekerja keluarga/tak dibayar, sehingga tidak lagi mencari pekerjaan di luar apa yang dikerjakan saat ini.



Gambar 6. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Selanjutnya, Gambar 5 menunjukkan persentase tingkat pekerja paruh waktu menurut kabupaten/kota. Jika dilihat sebarannya menurut kabupaten/kota, pada tahun 2022 tingkat pekerja paruh waktu tertinggi berada di Kabupaten Puncak yaitu sebesar 98,79 persen dan terendah berada di Puncak Jaya yaitu sebesar 53,64 persen.

7. KILM 7. Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang bekerja menurut jam kerja (biasanya atau sebenarnya).

Tabel 8. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Tahun 2022

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
< 25 jam	219.534	220.162	439.696
25-34 jam	248.013	207.834	455.847
35-39 jam	195.817	148.462	344.279
40-48 jam	288.949	172.379	461.328
49-59 jam	76.957	30.363	107.320
60+ jam	88.913	37.384	126.297
Indikator	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
< 25 jam	56.536	383.160	439.696
25-34 jam	48.806	407.041	455.847
35-39 jam	45.220	299.059	344.279
40-48 jam	147.054	314.274	461.328
49-59 jam	61.261	46.059	107.320
60+ jam	102.462	23.835	126.297

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

Data Sakernas menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk bekerja di Papua bekerja dengan jam kerja normal (lebih dari 35 jam per minggu), di mana persentase pekerja dengan jam kerja normal di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan. Pada tahun 2022, persentase pekerja dengan jam kerja normal di daerah perkotaan mencapai lebih dari 77 persen, sedangkan di perdesaan hanya sebesar 46,37 persen. Hal ini dapat dipengaruhi oleh mayoritas pekerja di daerah perdesaan merupakan pekerja di sektor non formal (sektor Pertanian) yang tidak memiliki batasan jam kerja per hari.

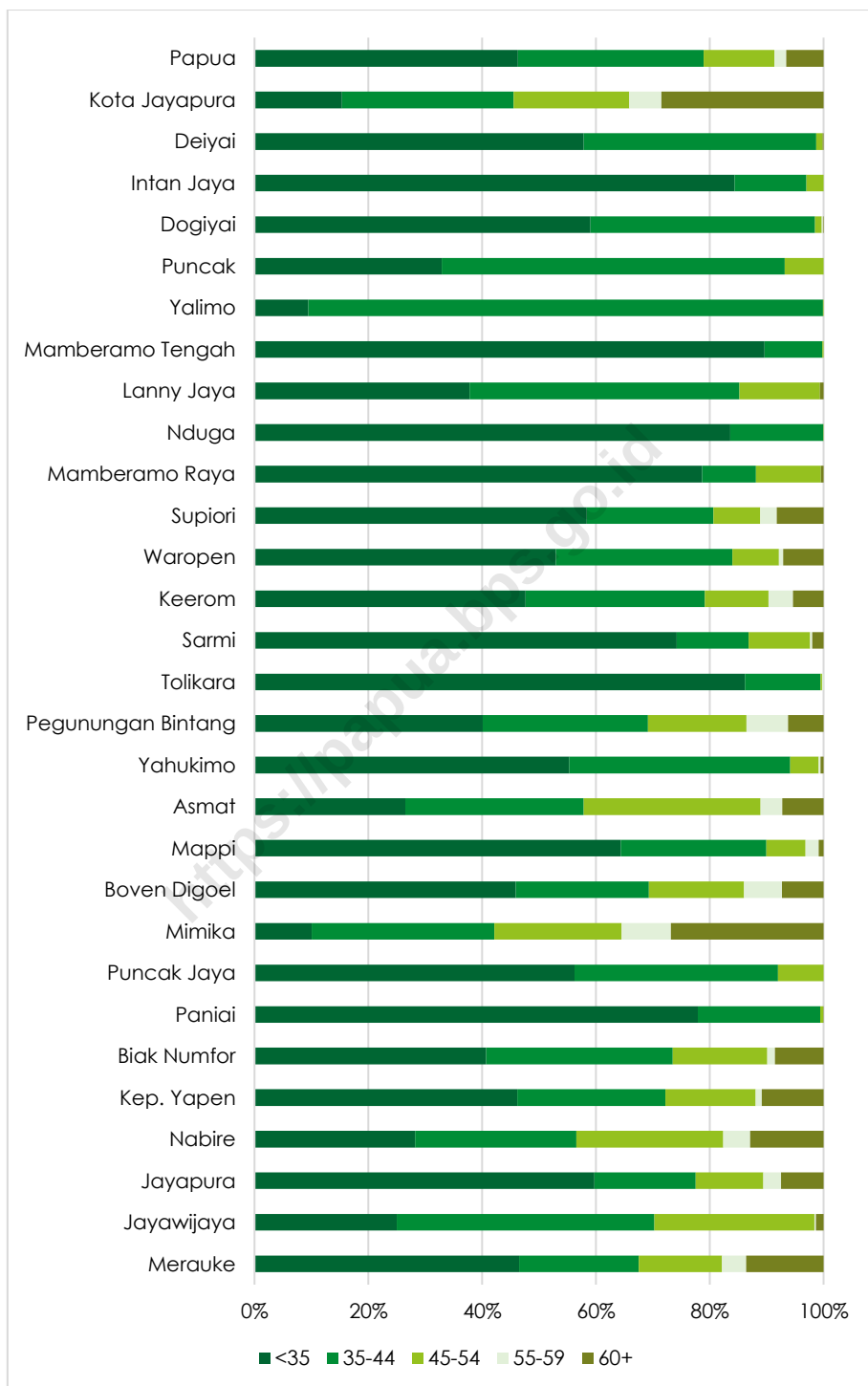
Sementara itu, apabila dilihat menurut jenis kelamin, persentase pekerja laki-laki yang bekerja di atas jam kerja normal cenderung lebih tinggi daripada perempuan. Hasil Sakernas menunjukkan bahwa sebanyak 58-59 dari 100 orang pekerja laki-laki bekerja sesuai atau melebihi jam kerja normal, sedangkan perempuan sekitar 47-48 orang.

Pengkategorian jam kerja menurut KILM 7 juga memungkinkan untuk melakukan analisis terhadap pekerja dengan jam kerja di atas 60 jam per

“Penduduk yang bekerja di atas 60 jam per minggu di daerah perkotaan mencapai 22,21 persen, sedangkan di perdesaan 1,62 persen.”

minggu. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat sekitar enam persen pekerja yang memiliki jumlah jam kerja yang cukup besar yaitu di atas 60 jam seminggu. Persentase tersebut terlihat cukup tinggi di daerah perkotaan dibanding perdesaan. Tercatat, sebesar 22,21 persen (102,46 ribu orang) di perkotaan bekerja lebih dari 60 jam per minggu, sedangkan di perdesaan hanya sekitar 23,84 ribu orang atau sekitar 1,62 persen dari total pekerja di perdesaan.

Sementara menurut jenis kelamin, persentase laki-laki yang bekerja lebih dari 60 jam seminggu lebih tinggi daripada pekerja perempuan. Data Sakernas mencatat sebesar 7,95 persen (88,91 ribu) pekerja laki-laki memiliki jam kerja lebih dari 60 jam seminggu sedangkan perempuan hanya sekitar 4,58 persen atau sebesar 37,38 ribu orang dari total pekerja perempuan di Papua.



Gambar 7. Persentase Pekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2021

Jika diamati dari distribusi penduduk bekerja pada level kabupaten/kota pada Gambar 6, dapat diketahui bahwa Kabupaten Mamberamo Tengah adalah kabupaten dengan persentase penduduk bekerja di bawah jam normal terbesar di Provinsi Papua dengan 89,60 persen. Disusul oleh Kabupaten Tolikara, Intan Jaya, dan Nduga yang memiliki persentase penduduk bekerja di bawah jam normal di atas 80 persen. Sementara itu, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Mimika adalah dua kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk bekerja di bawah jam normal terendah di Provinsi Papua, masing-masing adalah 9,46 persen dan 10,07 persen.

8. KILM 8. Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal

Pekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu, yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal. BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan pekerja sektor formal/informal yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dari jenis pekerjaan/jabatan.

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Pekerja Formal dan Informal, 2020-2022

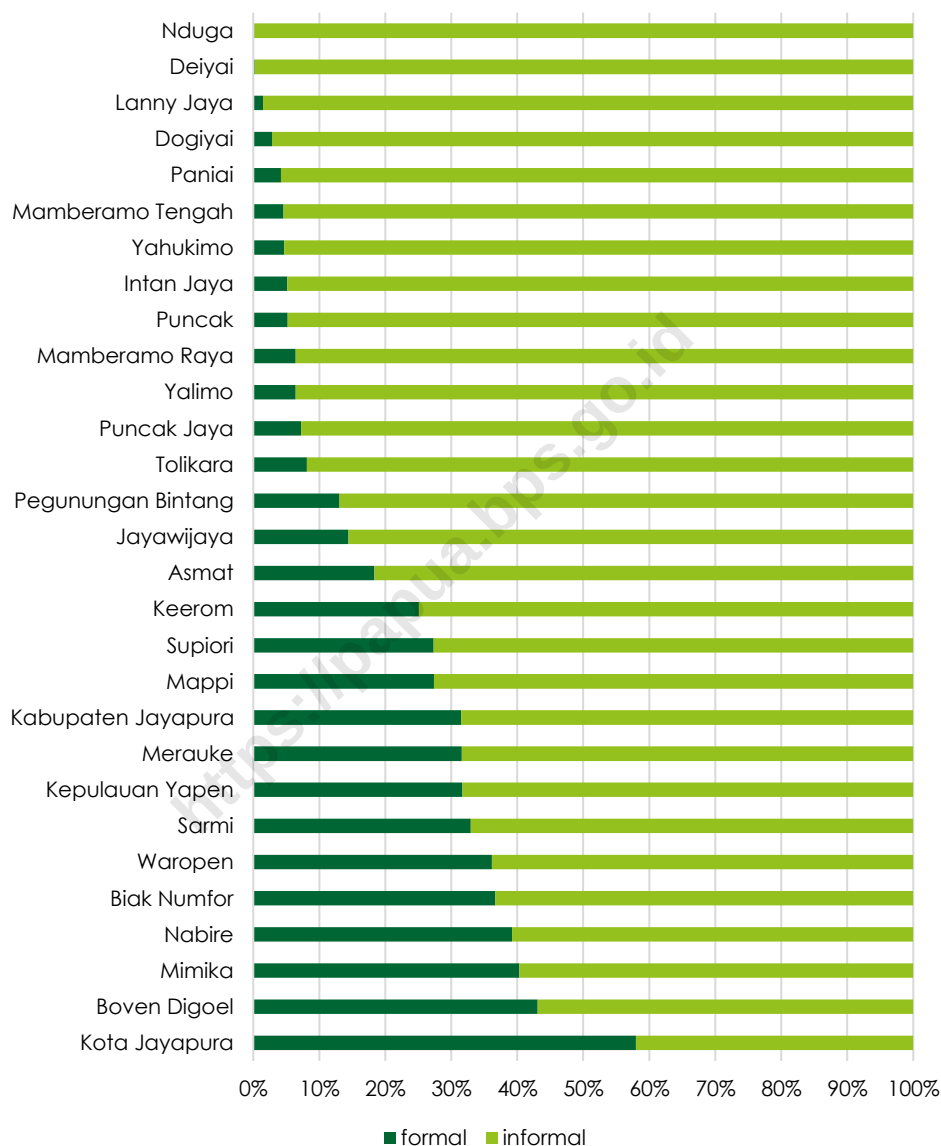
Indikator	2020		2021		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk 15+ yang bekerja	1.691.745	100	1.887.781	100	1.934.767	100
Laki-laki	988.727	58,44	1.102.027	58,38	1.118.183	57,79
Perempuan	703.018	41,56	785.754	41,62	816.584	42,21
Perkotaan	427.370	25,26	453.360	24,02	461.339	23,84
Perdesaan	1.264.375	74,74	143.4421	75,98	1.473.428	76,16
Jumlah pekerja formal	339.754	20,08	368.644	19,53	307.364	15,89
Laki-laki	246.358	72,51	264.175	71,66	225.154	20,14
Perempuan	93.396	27,49	104.469	28,34	82.210	10,07
Perkotaan	211.489	62,25	228.094	61,87	215.407	46,69
Perdesaan	128.265	37,75	140.550	38,13	91.957	6,24
Jumlah pekerja informal	1.351.991	79,92	1.519.137	80,47	1.627.403	84,11
Laki-laki	742.369	54,91	837.852	55,15	893.029	79,86
Perempuan	609.622	45,09	681.285	44,84	734.374	89,93
Perkotaan	215.881	15,97	225.266	14,83	245.932	53,31
Perdesaan	1.136.110	84,03	1.293.871	85,17	1.381.471	93,76

Sumber: Sakernas 2020-2022 data diolah

Pada Tabel 9 dapat dilihat sebaran pekerja di sektor formal dan informal yang diklasifikasikan menurut beberapa karakteristik demografi yaitu jenis kelamin dan wilayah tempat tinggal. Terlihat bahwa pada Agustus 2022, proporsi pekerja yang bekerja di sektor informal mencapai 84,11 persen meningkat selama periode tiga tahun terakhir. Sebaliknya, persentase pekerja formal di Papua tidak lebih dari 16 persen.

Persentase pekerja laki-laki yang bekerja di sektor formal lebih tinggi daripada perempuan. Data Sakernas menunjukkan bahwa di tahun 2022, terdapat sekitar 20 persen dari total pekerja laki-laki di sektor formal, sedangkan perempuan hanya sekitar 10 persen. Sementara menurut daerah tempat tinggal, persentase pekerja di perkotaan yang bekerja di sektor formal jauh lebih tinggi (46,69 persen) daripada di daerah perdesaan sebesar 6,24 persen.

Hal ini dapat disebabkan karena di daerah perkotaan cenderung lebih banyak tersedia pekerjaan di sektor formal daripada di daerah perdesaan.



Gambar 8. Persentase Pekerja Menurut Sektor dan Kabupaten/Kota, 2022

Gambar 7 menampilkan sebaran pekerja sektor formal dan informal di masing-masing kabupaten/kota. Dapat dilihat bahwa pekerja di sektor informal mendominasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua.

BAB 3

"PENGANGGURAN"

Jumlah pengangguran mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022 sebanyak **8.666** jiwa atau **13.33 %** di Provinsi Papua



PENGANGGURAN

“Unemployment is an invisible agony. (Pengangguran merupakan penderitaan yang tidak terlihat secara fisik, namun sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang.)”

— **Diana Frances Spencer (Putri Diana)**

1. KILM 9. Pengangguran

KILM 9 secara khusus merujuk pada pengangguran, yang merupakan salah satu aspek penting dalam analisis pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran merupakan ukuran pasar tenaga kerja yang paling terkenal dan tentu saja salah satu yang paling banyak mendapat perhatian pemerintah. Angka tingkat pengangguran mencerminkan kurangnya lapangan kerja yang ada. Pengangguran mengacu pada situasi di mana seseorang yang ingin bekerja dan memiliki kemampuan bekerja tetapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Informasi yang dihasilkan dari KILM 9 dapat memberikan pemahaman tentang kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Data pengangguran ini dapat digunakan untuk menganalisis tren pengangguran, membandingkan kondisi tenaga kerja antara wilayah, serta merancang kebijakan dan program untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

KILM 9 mengacu pada ukuran pengangguran yang diterima secara internasional, yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. BPS mengukur pengangguran melalui Survei Angkatan Kerja (Sakernas) yang dilakukan secara periodik. Salah satu indikator yang dihasilkan adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan aktif dan siap bekerja dalam periode waktu tertentu.

Baik dari perspektif ekonomi maupun sosial, penting untuk setiap wilayah dapat mengukur pengangguran yang ada. Data pengangguran sangat penting dalam merencanakan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif. Dengan

memahami tingkat pengangguran dan karakteristik pengangguran, pemerintah dan para *stakeholder* dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja, seperti kesenjangan keterampilan atau ketidakseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Tingkat pengangguran secara keseluruhan merupakan ukuran umum yang digunakan untuk melihat ketersediaan tenaga kerja yang tidak digunakan secara optimal. Jika dianggap bahwa bekerja adalah situasi yang ideal (aktif secara ekonomi), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun, dalam jangka pendek, adanya tingkat pengangguran dalam batas tertentu diperlukan sebagai bentuk penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, atau lapangan usaha, bermanfaat dalam mengidentifikasi kelompok pekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Papua adalah provinsi yang memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang unik. Wilayah ini memiliki tantangan khusus dalam hal pengembangan ketenagakerjaan. Berikut adalah gambaran indikator pengangguran di Papua selama tiga tahun terakhir:

Tabel 10. Indikator Pengangguran Papua, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Angkatan kerja	1.767.403	1.952.777	1.991.097
Laki-laki	1.038.467	1.144.918	1.156.801
Perempuan	728.936	807.859	834.296
Perkotaan	469.440	487.794	496.249
Perdesaan	1.297.963	1.464.983	1.494.848
Jumlah Pengangguran	75.658	64.996	56.330
Laki-laki	49.740	42.891	38.618
Perempuan	25.918	22.105	17.712
Perkotaan	42.070	34.434	349.10
Perdesaan	33.588	30.562	21.420
TPT	4,28	3,33	2,83

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	4,79	3,75	3,34
Perempuan	3,56	2,74	2,12
Perkotaan	8,96	7,06	7,03
Perdesaan	2,59	2,09	1,43

Sumber: Sakernas 2020-2022, data diolah

Dalam tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan angkatan kerja di Provinsi Papua sementara jumlah pengangguran terus menurun. Data dari Tabel 10 menunjukkan bahwa dalam tiga terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua mengalami penurunan. Pada tahun 2022, TPT di Provinsi Papua mencapai 2,83 persen, turun sebesar 0,50 persen dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021.

*"Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) Provinsi Papua
Tahun 2022 sebesar 2,83
persen"*

Namun, jika kita melihat data berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan antara jumlah pengangguran laki-laki dan perempuan. TPT laki-laki mencapai 3,34 persen, angka yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan TPT perempuan yang sebesar 2,12 persen.

Ini menunjukkan bahwa terjadi tren positif dalam pasar tenaga kerja di Provinsi Papua. Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat, sementara jumlah pengangguran terus menurun. Meskipun demikian, masih ada perbedaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengangguran. Hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan dan mengatasi masalah kesenjangan gender di pasar tenaga kerja.

Jika kita melihat secara wilayah, terdapat perbedaan yang signifikan untuk angka pengangguran antara perkotaan dan perdesaan di Papua. Secara umum, pengangguran di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah perdesaan. Pada tahun 2022, TPT di perkotaan mencapai angka 7,03 persen, sementara di perdesaan hanya sebesar 1,43 persen.

Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran tinggi di perkotaan dapat bervariasi, termasuk pertumbuhan populasi yang cepat karena migrasi masuk

dari wilayah lain, dan persaingan yang ketat di pasar tenaga kerja perkotaan. Di sisi lain, wilayah perdesaan cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah karena adanya sektor pertanian atau pekerjaan informal lainnya yang tidak terlalu variatif di perdesaan.

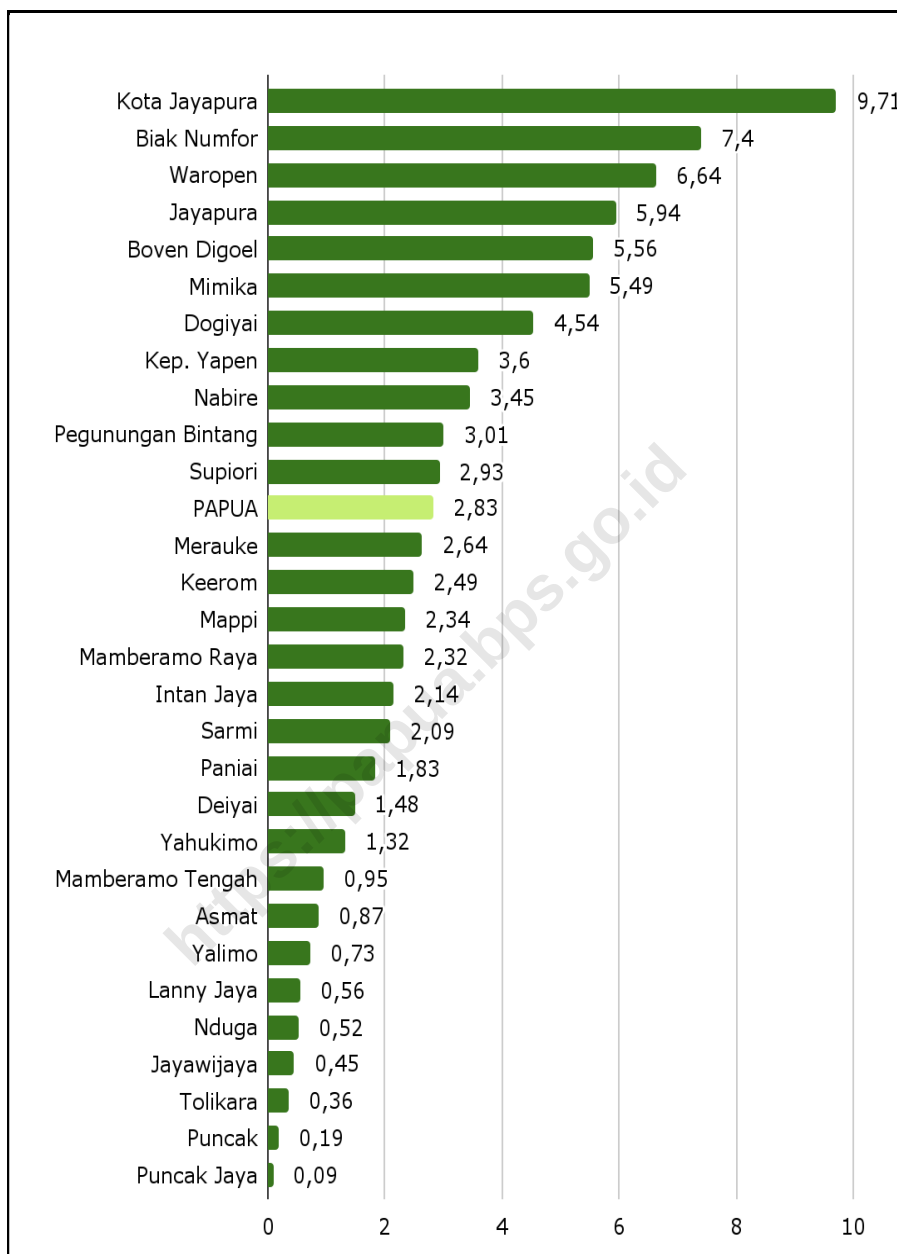
Penting untuk memahami perbedaan ini karena dapat memberikan wawasan tentang dinamika pasar tenaga kerja di Papua. Hal ini juga dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang sesuai guna mengatasi pengangguran di seluruh wilayah Papua. Dengan memahami kondisi pengangguran di perkotaan dan perdesaan secara lebih mendalam, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk menciptakan peluang kerja yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah Papua.

Selain melihat Provinsi Papua secara keseluruhan, kita juga perlu melihat tingkat pengangguran di masing-masing kabupaten/kota. Jika kita lihat TPT untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2022, terlihat bahwa Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, dan Tolikara secara berurutan memiliki tingkat pengangguran terendah. Bahkan, terdapat sembilan kabupaten dengan TPT di bawah satu persen. Delapan dari sembilan kabupaten ini terletak di wilayah pegunungan, di mana jenis pekerjaan yang tersedia terbatas. Mayoritas masyarakat di wilayah tersebut adalah petani yang berusaha sendiri atau dibantu oleh pekerja tak dibayar.

Di sisi lain, wilayah dengan TPT tinggi cenderung memiliki karakteristik perkotaan. Kota Jayapura dan Biak Numfor secara berturut-turut merupakan wilayah dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Dari enam wilayah dengan TPT di atas lima persen, empat di antaranya adalah wilayah perkotaan.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi adalah TPT di Kota Jayapura, sedangkan TPT terendah adalah TPT di Kabupaten Puncak Jaya

Dengan penjelasan ini, dapat dilihat bahwa karakteristik wilayah memainkan peran penting dalam tingkat pengangguran. Wilayah pegunungan cenderung memiliki TPT yang lebih rendah karena keterbatasan jenis pekerjaan, sedangkan wilayah perkotaan cenderung memiliki TPT yang lebih tinggi.



Gambar 9. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Tingkat pengangguran memang merupakan indikator yang informatif untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja dan perekonomian secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa tingkat pengangguran tidak mencerminkan secara langsung kesulitan ekonomi atau tingkat kesejahteraan seseorang. Indikator ini hanya mencerminkan proporsi angkatan kerja yang

tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan. Hal ini tidak memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi individu atau keluarganya. Oleh karena itu, penggunaan tingkat pengangguran sebaiknya dibatasi untuk mengukur penggunaan tenaga kerja dan sebagai indikasi kegagalan dalam mencari pekerjaan. Untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi, perlu mempertimbangkan indikator-indikator pendapatan atau penghasilan lainnya.

Tingkat pengangguran yang rendah tidak selalu menunjukkan bahwa situasi ekonomi di suatu wilayah berjalan dengan baik. Hal ini terutama berlaku jika wilayah tersebut tidak memiliki sistem perlindungan sosial yang memadai. Banyak orang mungkin terpaksa bekerja dalam kondisi yang tidak ideal, seperti dalam sektor informal, karena mereka tidak memiliki pilihan lain ketika menghadapi pengangguran tanpa adanya tunjangan atau bantuan sosial.

Dalam konteks ini, fokus yang lebih tepat di negara-negara berkembang adalah menciptakan pekerjaan yang layak dan produktif bagi penduduknya. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengakses lapangan kerja yang memberikan penghasilan yang mencukupi, kondisi kerja yang aman dan manusiawi, serta akses ke perlindungan sosial yang memadai. Dengan menciptakan lapangan kerja yang layak, dapat meningkatkan penggunaan tenaga kerja secara produktif, meningkatkan kualitas hidup, dan selanjutnya mengurangi tingkat kemiskinan.

Poin penting untuk disadari bahwa pengangguran yang rendah tidak selalu berarti kemakmuran yang merata di masyarakat. Upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif harus diiringi dengan kebijakan yang mendukung perlindungan sosial, pembangunan keterampilan, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan. Hanya dengan pendekatan holistik dan terpadu ini, kita dapat mencapai kemajuan nyata dalam menciptakan kondisi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. KILM 10. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

KILM 10 merupakan satu-satunya indikator yang membahas secara spesifik tentang pemuda. Pengangguran pada kelompok umur muda (*youth*

unemployment) merupakan masalah penting yang menjadi perhatian bagi banyak negara karena berkaitan dengan stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam konteks indikator ini, istilah "usia muda" mengacu pada individu yang berusia antara 15 hingga 24 tahun, sedangkan istilah "usia dewasa" mengacu pada individu yang berusia 25 tahun ke atas. Kelompok umur muda sering kali menghadapi tantangan khusus dalam mencari pekerjaan karena kurangnya pengalaman kerja, keterbatasan keterampilan yang dimiliki, dan persaingan yang ketat di pasar tenaga kerja.

Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran kaum muda;
2. Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
3. *Share* pengangguran kaum muda terhadap total;
4. Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Tingkat pengangguran pada kelompok umur muda merupakan indikator penting untuk mengukur dan menganalisis tren pasar tenaga kerja saat ini serta tantangan yang dihadapi oleh para pemuda. Indikator ini dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada para pembuat kebijakan, pemerintah, organisasi pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi masalah pengangguran dan tantangan lainnya yang dihadapi oleh pemuda dalam pasar tenaga kerja. Berikut adalah gambaran indikator pengangguran untuk kelompok umur muda di Papua selama tiga tahun terakhir:

Tabel 11. Indikator Pengangguran Kelompok Umur Muda di Papua, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
TPT Penduduk Usia Muda	9,58	10,17	9,05
Laki-laki	10,66	11,83	11,38
Perempuan	8,19	7,90	6,25
Perkotaan	24,40	24,82	25,76
Perdesaan	5,83	6,48	5,00
Rasio TPT Usia Muda terhadap TPT Usia Dewasa	2,93	4,88	5,95
Laki-laki	2,86	5,14	6,43

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Perempuan	3,15	4,45	5,35
Perkotaan	3,58	5,46	8,10
Perdesaan	3,07	5,29	5,95
Share Penganggur Muda terhadap Total Penganggur (%)	35,92	47,04	55,51
Laki-laki	34,17	47,93	55,62
Perempuan	39,28	45,31	55,26
Perkotaan	33,21	43,61	49,73
Perdesaan	39,32	50,90	64,92

Sumber: Sakernas 2020-2022, data diolah

Dalam tiga tahun terakhir, terlihat terjadi fluktuasi tingkat pengangguran penduduk kelompok usia muda di Papua. Pada tahun 2022 pengangguran usia muda di Papua sebesar 9,05 persen. Angka ini merupakan terendah dalam tiga tahun terakhir, yaitu menurun 1,12 dibandingkan tahun sebelumnya dan turun 0,53 dari tahun 2020. Artinya terjadi perkembangan yang positif untuk tingkat pengangguran usia muda di Papua dalam tiga tahun terakhir.

Selanjutnya jika kita merinci berdasarkan jenis kelamin, TPT usia muda untuk penduduk laki-laki menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan TPT usia muda untuk penduduk perempuan. Kondisi ini bertahan selama tiga tahun terakhir, bahkan pada tahun 2022 terlihat selisih yang cukup signifikan antara TPT usia muda laki-laki (11,38) dengan TPT usia muda perempuan (6,25). Hal ini menunjukkan masih ada kesenjangan antar jenis kelamin pada usia muda dalam kemampuan memperoleh pekerjaan.

Masih adanya pandangan bahwa laki-laki memiliki peran yang lebih penting dalam menyediakan nafkah bagi keluarga. Ini dapat menyebabkan tekanan lebih besar bagi laki-laki untuk mencari pekerjaan yang memenuhi harapan ini, sehingga meningkatkan tingkat persaingan. Selain itu, adanya stereotip gender yang masih berlaku di masyarakat, di mana laki-laki dianggap lebih cocok untuk pekerjaan tertentu. Beberapa sektor pekerjaan juga memiliki persaingan yang lebih ketat di antara laki-laki, seperti sektor konstruksi atau industri berat. Beberapa hal tersebut membuat laki-laki usia muda menghadapi kesulitan

dalam bersaing dengan rekan-rekan sejenis mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

TPT usia muda di perkotaan lebih tinggi 5 kali lipat dibandingkan di perdesaan

Jika kita lihat berdasarkan wilayahnya, kesenjangan lebih terlihat pada TPT kelompok umur muda, dimana TPT usia muda untuk wilayah perkotaan mencapai 25,76 persen, sedangkan untuk perdesaan hanya 5,00 persen. Masih senada dengan kondisi Papua

secara umum, lebih variatifnya pekerjaan yang tersedia di perkotaan dibandingkan perdesaan dan tingginya persaingan mencari pekerjaan di perkotaan menjadi salah satu alasan tingginya angka pengangguran di perkotaan untuk usia muda.

Adapun berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, ditemukan bahwa di Papua, proporsi pengangguran usia muda terhadap total penganggur mencapai lebih dari setengahnya, yaitu sebesar 55,51 persen. Artinya, pada bulan Agustus 2022, sekitar 55 dari setiap 100 orang penganggur di Papua berusia antara 15 hingga 24 tahun. Lebih menariknya lagi, terdapat tren peningkatan angka ini selama tiga tahun terakhir, yang mengindikasikan bahwa jumlah pengangguran usia muda di Papua semakin meningkat. Hal ini menggambarkan tantangan yang signifikan dalam menciptakan peluang kerja bagi generasi muda di Papua.

Demikian pula untuk *share* pengangguran usia muda berdasarkan jenis kelamin, terlihat kondisi yang mirip untuk penduduk laki-laki dan perempuan, masing-masing sebesar 55,62 dan 55,26. Hal ini mengindikasikan bahwa baik untuk laki-laki maupun perempuan, proporsi pengangguran usia muda masih tetap tinggi.

Sementara itu, kondisi yang cukup menarik terjadi untuk *share* pengangguran usia muda berdasarkan wilayah. *Share* pengangguran usia muda di perdesaan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan, masing-masing sebesar 64,92 dan 49,73. Artinya dari total pengangguran yang ada, untuk pengangguran berusia muda (15-24 tahun) di wilayah perdesaan lebih banyak dibandingkan di wilayah perkotaan.

Penduduk usia muda saat ini menghadapi sebuah ketidakpastian untuk bisa masuk ke pasar kerja, dan ketidakpastian dan kekecewaan ini dapat memiliki

dampak yang merusak terhadap individu, masyarakat, ekonomi, dan masyarakat secara luas. Kontribusi rendah terhadap pembangunan nasional oleh para pemuda yang menganggur atau bekerja dengan upah rendah, mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan penolakan terhadap sistem sosial-ekonomi yang ada.

Pengangguran kelompok usia muda memang merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan untuk mengatasinya terutama di Papua. Para pencari kerja usia muda di Papua masih menghadapi berbagai hambatan untuk bisa memasuki pasar kerja dan bersaing memperoleh pekerjaan yang ideal. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pengalaman kerja, yang membuat sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Selain itu, ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pemuda dan kebutuhan yang ada di pasar kerja, yang mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda di Papua.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang efektif. Peningkatan keterampilan menjadi salah satu solusi utama, dengan meningkatkan akses pemuda terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan dunia kerja. Selain itu, perlu juga dilakukan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan dunia kerja untuk memastikan bahwa pemuda memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja di Papua. Pelatihan kewirausahaan juga dapat menjadi solusi yang efektif, dengan memberikan dukungan dan kegiatan pelatihan kepada pemuda untuk menjadi wirausaha yang mandiri di Papua.

Selain itu, perlu adanya upaya dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas bagi pemuda melalui dukungan pada sektor ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan promosi pertumbuhan ekonomi. Program-program peningkatan kualitas sumber daya terutama untuk pemuda di Papua juga penting untuk membantu mereka dalam mencari pekerjaan, mengembangkan keterampilan, dan mendapatkan akses ke modal usaha. Selain itu, penting juga untuk membangun dialog sosial yang kuat antara pemuda, pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya guna memahami tantangan yang dihadapi oleh pemuda dan mencari solusi bersama.

Dengan menghadapi tantangan pengangguran kelompok usia muda melalui solusi-solusi yang komprehensif, dapat memberikan peluang yang lebih baik bagi pemuda untuk meraih keberhasilan dalam dunia kerja dan berkontribusi secara positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi Provinsi Papua.

3. KILM 12. Setengah Pengangguran

KILM 12 ini membahas penduduk yang bekerja namun menghadapi ketidakpenuhkerjaan (*underemployment*) terkait waktu, yang berarti jam kerjanya tidak mencukupi/sesuai dengan keinginan dan ketersediaannya untuk bekerja lebih lama. *Underemployment* mencerminkan tidak optimalnya pemanfaatan kapasitas produktif dari angkatan kerja. Indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang dalam angkatan kerja menghadapi ketidakpenuhkerjaan terkait waktu dan memberikan perspektif mengenai kurangnya jam kerja yang diinginkan yang mereka alami. Informasi ini yang diperoleh melalui Sakernas adalah data setengah pengangguran.

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Data setengah pengangguran memberikan gambaran tentang seberapa banyak orang yang bekerja di bawah potensi penuh mereka. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya lapangan kerja yang memadai, ketidaksesuaian antara kualifikasi dan permintaan tenaga kerja, atau karena keterbatasan lain yang mencegah individu untuk bekerja penuh waktu.

Indikator setengah pengangguran memberikan perspektif yang lebih lengkap dalam memahami pasar tenaga kerja. Selain tingkat pengangguran yang mengukur mereka yang sepenuhnya tidak bekerja, data setengah pengangguran menyoroti adanya ketidaksempurnaan dalam pemanfaatan tenaga kerja di masyarakat.

Pada tahun 2022, tercatat bahwa jumlah setengah pengangguran di Papua mencapai 113.208 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, jumlah setengah pengangguran mencapai 164.693 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 190.463 ribu jiwa. Hal ini menandakan adanya perbaikan yang

signifikan dalam mengurangi jumlah setengah pengangguran di Papua. Persentase setengah penganggur juga mengalami penurunan sebesar 2,87 persen poin dibandingkan dengan tahun 2021.

Jika dibandingkan berdasarkan karakteristiknya, terdapat perbedaan yang signifikan antara penduduk setengah penganggur perempuan dan laki-laki. Jumlah penduduk setengah penganggur perempuan hanya separuh dari jumlah penduduk setengah penganggur laki-laki. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 37.952 jiwa perempuan setengah penganggur, sedangkan jumlah penduduk setengah penganggur laki-laki mencapai 75.252 jiwa.

Pada tahun 2022, tercatat bahwa jumlah setengah pengangguran di Papua mencapai 113.208 ribu jiwa

Selain itu, jika dilihat dari wilayah tempat tinggalnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara penduduk setengah penganggur di perkotaan dan di perdesaan. Jumlah penduduk setengah penganggur di perkotaan tercatat hanya sebanyak 15.884 jiwa, sedangkan jumlah penduduk setengah penganggur di perdesaan mencapai 97.320 jiwa. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan jenis lapangan kerja di perdesaan yang masih didominasi sektor informal, sedangkan di perkotaan lebih banyak tersedia pekerjaan sektor formal dengan jam kerja yang ketat dan telah ditentukan.

Selanjutnya jika kita lihat lebih mendalam terkait indikator setengah pengangguran di Papua selama tiga tahun terakhir, selama periode 2020 hingga 2022, terlihat adanya tren penurunan dalam persentase setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Berdasarkan tabel 12, persentase tersebut menurun dari 10,78 persen pada 2020 menjadi 8,43 persen pada 2021, dan kemudian turun lagi sebesar 2,74 persen poin menjadi 5,69 persen pada 2022. Artinya, jumlah individu yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran dalam angkatan kerja di Papua mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir.

Selain itu, persentase setengah pengangguran terhadap total penduduk yang bekerja, juga mengalami pola yang serupa dengan persentase setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Pada 2020, ada 11,26 persen dari total penduduk yang bekerja termasuk dalam kategori setengah

pengangguran. Namun, pada 2021, persentasenya turun menjadi 8,72 persen, dan pada 2022, angka tersebut turun sebesar 2,40 persen poin menjadi 5,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi individu yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran dalam populasi pekerja di Papua juga mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir.

Tabel 12. Indikator Setengah Pengangguran di Papua, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Setengah Pengangguran Terhadap Angkatan Kerja	10,78	8,43	5,69
Laki-laki	10,42	8,45	6,51
Perempuan	11,28	8,40	4,51
Perkotaan	6,08	5,10	3,20
Perdesaan	12,47	9,54	6,51
Persentase Setengah Pengangguran Terhadap Total Penduduk Bekerja	11,26	8,72	5,85
Laki-laki	10,95	8,78	6,73
Perempuan	11,69	8,64	4,65
Perkotaan	6,68	5,49	3,44
Perdesaan	12,81	9,75	4,65

Sumber: Sakernas 2020-2022, data diolah

Selama periode tiga tahun terakhir persentase setengah pengangguran terhadap total penduduk bekerja di Papua untuk laki-laki dan perempuan mengalami penurunan. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada perempuan, dengan penurunan sebesar 3,99 persen poin jika dibandingkan dengan 2021, sedangkan untuk persentase setengah pengangguran terhadap total penduduk bekerja laki-laki hanya menurun 2,05 persen poin. Artinya, jumlah perempuan bekerja yang termasuk dalam kategori setengah pengangguran mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki bekerja yang setengah menganggur dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase setengah pengangguran terhadap total penduduk bekerja di Papua untuk perkotaan dan perdesaan sama-sama mengalami penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan 2021,

penurunan persentase setengah pengangguran terhadap total penduduk bekerja di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan, yaitu menurun sebesar 5,10 persen poin. Sementara itu, persentase setengah pengangguran terhadap total penduduk bekerja di perkotaan hanya menurun sebesar 2,05 persen poin.

Mengetahui persentase setengah penganggur terhadap angkatan kerja memiliki kegunaan yang penting dalam mengukur tingkat pengangguran yang lebih akurat dan memberikan pemahaman tentang sejauh mana tenaga kerja di Papua dikelola dengan efektif. Persentase ini memungkinkan kita untuk melihat proporsi individu yang bekerja secara tidak penuh atau di bawah kapasitas produktif mereka, yang dapat mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta kemungkinan adanya kesenjangan dalam penciptaan lapangan kerja yang memadai. Sedangkan dengan mengetahui persentase setengah penganggur terhadap penduduk bekerja akan membantu dalam mengidentifikasi sejauh mana pasar tenaga kerja tidak efektif dalam memanfaatkan potensi produktif para pekerja. Dengan memahami berbagai indikator setengah pengangguran di Papua, para *stakeholder* seperti pemerintah, dan lembaga terkait dapat merancang strategi dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk kemajuan Papua secara keseluruhan.

4. KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja suatu wilayah yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Individu dianggap tidak aktif dalam pasar tenaga kerja adalah jika mereka tidak bekerja dan tidak menganggur, artinya mereka tidak aktif mencari pekerjaan. Ada berbagai alasan mengapa beberapa individu tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja, seperti merawat anggota keluarga, pensiun, sakit atau cacat, atau sedang bersekolah. Selain itu, ada juga individu yang mungkin tidak ingin bekerja.

Tingkat ketidakaktifan yang tinggi pada kelompok populasi tertentu tidak selalu dapat diasumsikan sebagai kondisi yang buruk. Misalnya, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi pada kelompok usia 25 hingga 34 tahun mungkin disebabkan

oleh mereka yang tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja karena sedang mengejar pendidikan. Begitu pula, tingkat ketidakaktifan yang tinggi pada wanita usia 25 hingga 34 tahun mungkin disebabkan oleh mereka yang meninggalkan pasar tenaga kerja untuk mengurus tanggung jawab keluarga seperti melahirkan dan merawat anak. Data KILM 13 dapat digunakan untuk mengetahui pola angkatan kerja wanita.

Ada juga kelompok individu di luar pasar tenaga kerja yang dikenal sebagai pencari kerja yang putus asa. Mereka adalah orang-orang yang tidak masuk dalam angkatan kerja, tetapi tetap tersedia untuk bekerja namun tidak lagi mencari pekerjaan karena alasan yang terkait dengan pasar tenaga kerja, misalnya karena mereka percaya bahwa tidak ada pekerjaan yang tersedia. Meskipun alasan mereka untuk putus asa bisa beragam, para pencari kerja potensial ini umumnya dianggap tidak digunakan secara optimal. Keberadaan pencari kerja yang putus asa terimplikasikan jika angkatan kerja terukur tumbuh ketika jumlah pengangguran menurun. Ketika jumlah pencari kerja yang putus asa tinggi, pembuat kebijakan dapat berusaha "merekrut" anggota kelompok ini dengan meningkatkan layanan penempatan kerja.

Tingkat ketidakaktifan diukur melalui proporsi penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Jika dijumlahkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (lihat KILM 1), maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 dikurang TPAK (1-TPAK). Berikut adalah indikator ketidakaktifan di Papua selama tiga tahun terakhir:

Tabel 13. Indikator Ketidakaktifan di Papua, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk 15 tahun ke atas (jiwa)	2.449.145	2.494.142	2.560.749
Laki-laki	1.300.741	1.325.019	1.353.179
Perempuan	1.148.404	1.169.123	1.207.570
Perkotaan	730.420	750.644	775.024
Perdesaan	1.718.725	1.743.498	1.785.725
Bukan angkatan kerja (jiwa)	681.742	541.365	569.652
Laki-laki	262.274	180.101	196.378

Perempuan	419.468	361.264	373.274
Perkotaan	260.980	262.850	278.775
Perdesaan	420.762	278.515	290.877
Tingkat ketidakaktifan (%)	27,84	21,71	22,25
Laki-laki	20,16	13,59	14,51
Perempuan	36,53	30,90	30,91
Perkotaan	35,73	32,66	35,97
Perdesaan	24,48	15,97	16,29

Sumber: Sakernas 2020-2022, data diolah

Pada tahun 2022, tingkat ketidakaktifan di Papua mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Peningkatan sebesar 0,64 persen poin terjadi pada tingkat ketidakaktifan di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan individu di Papua tidak aktif dalam mencari pekerjaan atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Selain tingkat ketidakaktifan, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 di Papua. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan individu di Papua yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja, yang mencakup individu yang bekerja dan yang menganggur.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja mengalami penurunan. Penurunan sebesar 5,59 persen poin menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam partisipasi angkatan kerja di Papua selama periode tersebut. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, atau pergeseran dalam struktur demografi.

Hanya sekitar 22 orang dari setiap 100 penduduk usia kerja di Papua yang tidak aktif dalam pasar kerja

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa tingkat ketidakaktifan dan partisipasi angkatan kerja di Papua mengalami perubahan selama tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan dalam tingkat ketidakaktifan jika dibandingkan

dengan tahun sebelumnya, penurunan signifikan terjadi jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara tingkat ketidakaktifan laki-laki dan perempuan berdasarkan data di Papua pada tahun 2022. Dalam populasi penduduk usia kerja, hanya sekitar 14 hingga 15 dari setiap 100 laki-laki yang tidak aktif dalam pasar kerja, sementara jumlah tersebut mencapai sekitar 30 hingga 31 dari setiap 100 perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi peningkatan tingkat ketidakaktifan baik pada laki-laki maupun perempuan, dengan peningkatan sebesar 0,92 persen poin untuk laki-laki dan hanya 0,01 persen poin untuk perempuan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2020, keduanya mengalami penurunan tingkat ketidakaktifan yang signifikan, dengan penurunan lebih dari 5 persen poin.

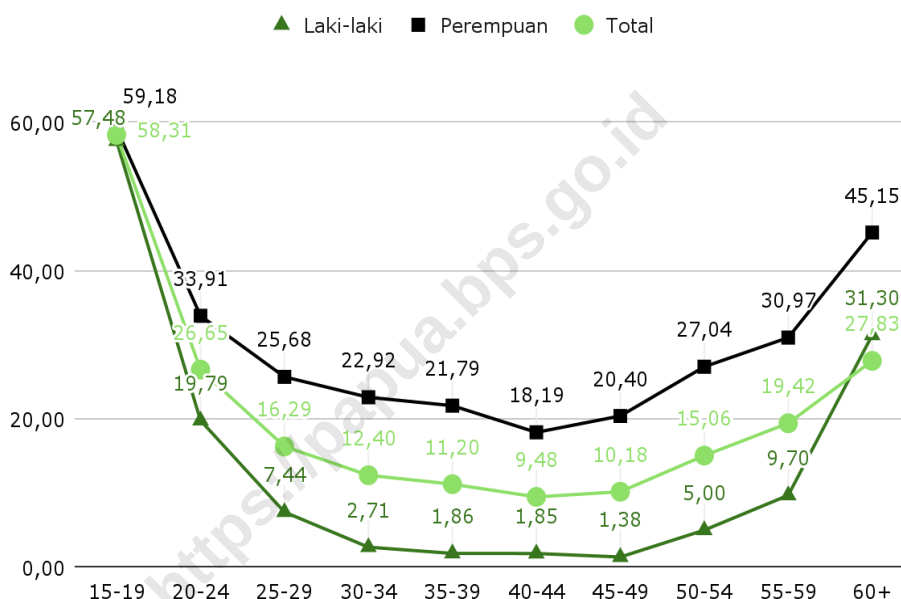
Perbedaan tingkat ketidakaktifan antara laki-laki dan perempuan di Papua pada tahun 2022 menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diperhatikan. Jumlah perempuan yang tidak aktif dalam pasar kerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Meskipun terdapat peningkatan tingkat ketidakaktifan pada laki-laki dan hanya sedikit peningkatan pada perempuan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan tingkat ketidakaktifan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan perluasan partisipasi dalam pasar kerja di Papua, namun tetap perlu upaya untuk mengurangi kesenjangan gender dalam tingkat ketidakaktifan.

Tingkat ketidakaktifan penduduk perkotaan mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk di perdesaan

Jika kita melihat berdasarkan daerah tempat tinggal, terlihat bahwa tingkat ketidakaktifan lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Meskipun demikian, peluang bekerja di perdesaan lebih besar mengingat tingginya tingkat Keterlibatan Ekonomi Penduduk (EPR) di daerah tersebut. Pada tahun 2022, tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan mencapai 35,97 persen, sedangkan di daerah perdesaan

hanya sebesar 16,29 persen. Terjadi peningkatan tingkat ketidakaktifan di kedua daerah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun peningkatan tersebut lebih signifikan di daerah perkotaan dengan

peningkatan sebesar 3,33 persen poin. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi penurunan tingkat ketidakaktifan di perdesaan sebesar 8,19 persen poin, sementara tingkat ketidakaktifan di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,24 persen poin. Hal ini menunjukkan bahwa perdesaan masih menyediakan peluang kerja yang lebih baik dibandingkan perkotaan, meskipun perlu dilakukan upaya untuk mengatasi tingkat ketidakaktifan yang meningkat di kedua daerah tersebut.



Gambar 10. Pola Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022

Gambar 10 memberikan informasi tentang pola ketidakaktifan penduduk di Papua menurut kelompok umur pada tahun 2022. Grafik tersebut menunjukkan pola yang mirip huruf "U", yang menandakan bahwa tingkat ketidakaktifan cenderung tinggi pada kelompok usia muda, kemudian menurun pada kelompok usia produktif, dan kembali meningkat pada kelompok usia tua. Pola ini terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Namun, terlihat bahwa pada laki-laki, grafik menurun dengan lebih curam ketika memasuki usia produktif. Dengan kata lain, tingkat ketidakaktifan laki-laki menjadi lebih rendah dan jauh lebih rendah dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk

laki-laki lebih cepat terlibat dalam aktivitas ekonomi dibandingkan penduduk perempuan.

Dalam Grafik 10, dapat dilihat bahwa secara umum tingkat ketidakaktifan pada perempuan di Papua lebih tinggi daripada laki-laki dalam kelompok umur yang sama. Pada tahun 2022, titik terendah tingkat ketidakaktifan laki-laki terjadi pada kelompok umur 45-59 tahun, sedangkan pada perempuan terjadi pada kelompok umur 40-44 tahun. Terlihat bahwa tingkat ketidakaktifan pada laki-laki menurun seiring bertambahnya usia, mulai dari kelompok umur 15-19 tahun (57,48 persen) hingga mencapai titik terendah 1,38 persen pada kelompok umur 45-49 tahun, dan kemudian meningkat kembali pada kelompok umur 50-54 tahun. Sementara itu, tingkat ketidakaktifan pada perempuan mencapai 59,18 persen pada kelompok umur 15-19 tahun. Titik terendah tingkat ketidakaktifan perempuan terjadi pada kelompok umur 40-44 tahun, kemudian mulai meningkat kembali pada kelompok umur 45-49 tahun menjadi 20,40 persen. Informasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan di Papua menurut kelompok umur pada tahun 2022.

Dengan mengetahui angka tingkat ketidakaktifan di Papua, para *stakeholder* dapat lebih memahami partisipasi angkatan kerja dan aktivitas ekonomi penduduk di Papua, mengidentifikasi kelompok yang rentan, mengukur dampak kebijakan ekonomi, dan melakukan perencanaan tenaga kerja yang efektif. Informasi ini membantu dalam analisis ekonomi, merumuskan kebijakan yang tepat, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik di tanah Papua ini.

BAB 4

“PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF”

Angkatan kerja di Papua masih didominasi oleh kelompok dengan tingkat pendidikan rendah atau SD ke bawah, yaitu mencapai **72,46%** pada 2022



PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

“Membaca adalah pondasi pengetahuan, dan bekerja adalah pondasi kesuksesan. Dua hal ini saling melengkapi dalam perjalanan hidupmu.”

— **Joko Widodo**

1. KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Sumber daya manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan sumber daya yang paling berharga dan produktif. Dalam era yang semakin maju ini, penting bagi suatu negara untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan. Keterampilan, melek huruf, dan pendidikan yang baik dari seluruh penduduk menjadi faktor penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan.

Secara keseluruhan, KILM 14 memberikan pandangan penting tentang pendidikan dan melek huruf dalam konteks ketenagakerjaan. Data yang dikumpulkan dalam KILM 14 penting karena pendidikan dan melek huruf memiliki hubungan erat dengan partisipasi dalam pasar tenaga kerja dan kesempatan kerja yang layak. Tingkat pendidikan yang tinggi dan tingkat melek huruf yang baik cenderung berhubungan dengan peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, indikator ini juga membantu dalam memahami hubungan antara pendidikan, melek huruf, dan ketenagakerjaan, serta memonitor perkembangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta program melek huruf di suatu negara. Dengan memahami dan menggunakan data dari indikator ini, dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan pendidikan dan melek huruf serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat.

Indikator ini menggunakan kategori yang secara konseptual didasarkan pada tingkat *International Standard Classification of Education* (ISCED) yang disesuaikan dengan variabel yang tersedia dalam Sakernas. Namun, disayangkan bahwa Sakernas tidak menyediakan data tentang kemampuan membaca dan menulis (melek huruf) penduduk yang bekerja. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek

huruf) hanya berdasarkan tingkat pendidikan yang dicapai. Berikut adalah kondisi pendidikan angkatan kerja di Papua selama tiga tahun terakhir:

Tabel 14. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendidikan Rendah	67.59	68.25	72,46
Laki-laki	62.03	62.77	66,95
Perempuan	75.49	76.01	80,09
Pendidikan Menengah	22.35	22.31	20,78
Laki-laki	27.70	55.06	25,94
Perempuan	14.27	14.44	13,62
Pendidikan Tinggi	10.07	9.44	6,76
Laki-laki	10.26	9.37	9,85
Perempuan	9.79	9.55	6,29

Sumber: Sakernas 2020-2022, data diolah

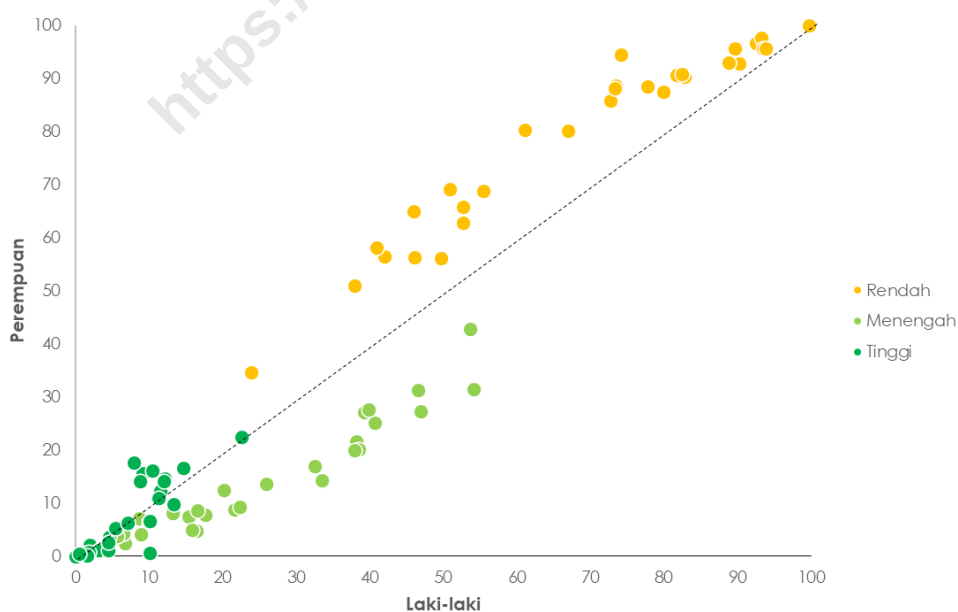
Pada tahun 2022 terlihat bahwa komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan di Provinsi Papua tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Angkatan kerja di Papua masih didominasi oleh kelompok dengan tingkat pendidikan rendah (SMP ke bawah), mencapai 72,46 persen pada tahun 2022. Persentase ini menggambarkan adanya tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Provinsi Papua.

Selanjutnya, kelompok angkatan kerja dengan pendidikan menengah (SMA/ sederajat) menyumbang sebesar 20,78 persen, sementara kelompok pendidikan tinggi (diploma ke atas) hanya mencapai 6,76 persen. Meskipun terdapat peningkatan dalam angkatan kerja dengan pendidikan rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, peningkatan ini masih perlu diperhatikan karena tidak mencerminkan perubahan yang signifikan secara keseluruhan.

Terlihat perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan berdasarkan data pada tahun 2022. Persentase angkatan kerja perempuan

dengan pendidikan rendah mencapai 80,09 persen, lebih tinggi dibandingkan angkatan kerja laki-laki yang sebesar 66,95 persen. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan di Provinsi Papua. Kondisi ini didukung persentase angkatan kerja dengan pendidikan menengah dan tinggi. Persentase angkatan kerja laki-laki dengan pendidikan menengah sebesar 25,94 persen, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hanya mencapai 13,62 persen pada tahun 2022. Begitu pula, dalam kelompok pendidikan tinggi, persentase angkatan kerja laki-laki sedikit lebih tinggi dengan 9,85 persen, dibandingkan perempuan yang mencapai 6,29 persen.

Angka ini mengindikasikan bahwa terdapat ketimpangan dalam kualitas pendidikan dan kompetensi antara laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja. Perempuan cenderung lebih banyak memiliki pendidikan rendah, sementara laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dalam pendidikan menengah dan tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi dalam dunia kerja.



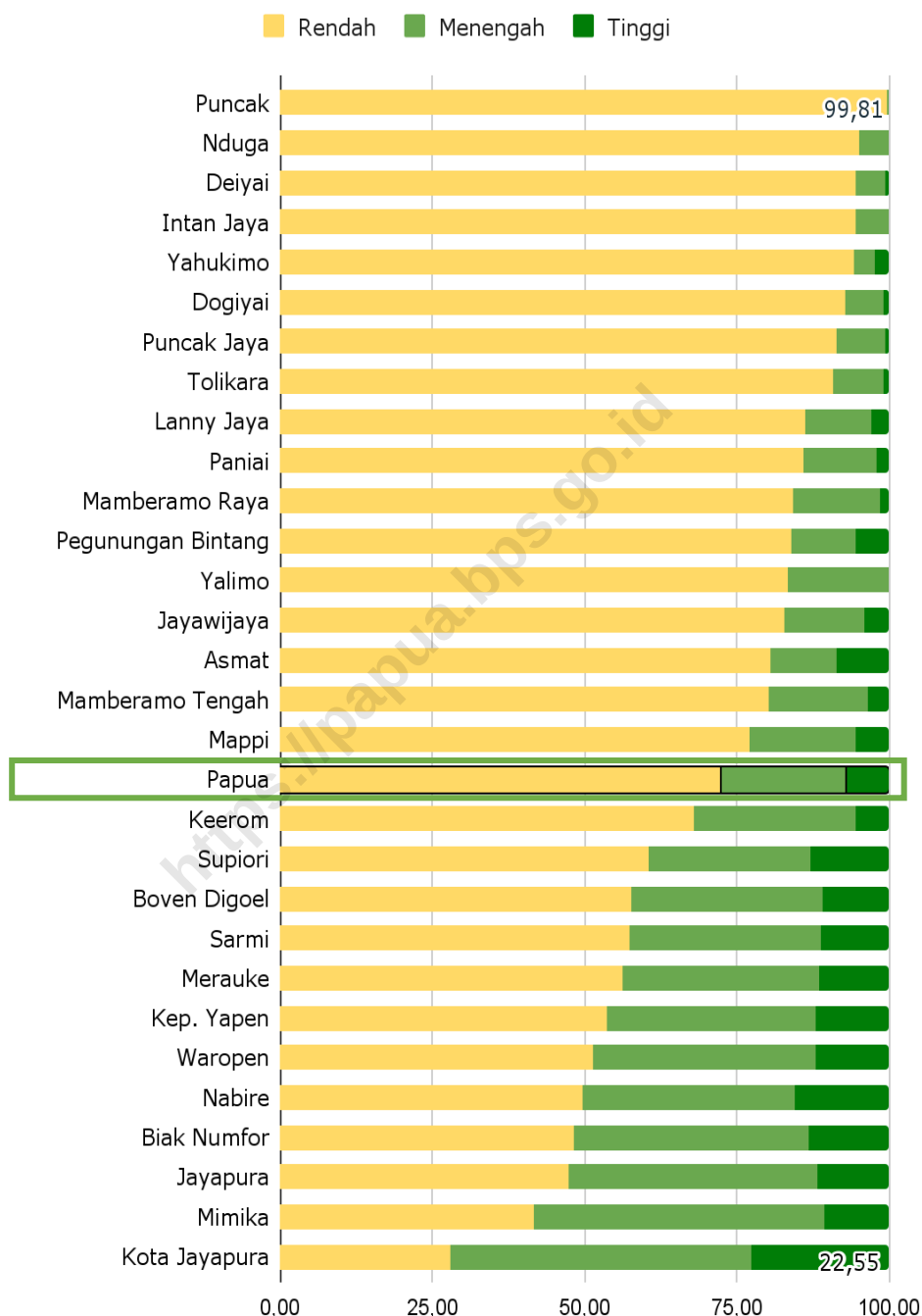
Gambar 11. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2022

Gambar 11 menunjukkan pola komposisi angkatan kerja di Papua berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa angkatan kerja perempuan di Papua cenderung lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan rendah. Di sisi lain, angkatan kerja laki-laki cenderung lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan menengah. Pola ini menggambarkan perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan di Papua.

Selanjutnya jika lihat komposisi pendidikan angkatan kerja di 29 kabupaten/kota di wilayah Papua, terlihat bahwa Kota Jayapura memiliki kualitas pendidikan angkatan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain di Papua. Hal ini dapat dilihat dari persentase angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan menengah yang tertinggi ada di Kota Jayapura. Pada tahun 2022, persentase angkatan kerja dengan pendidikan tinggi di Kota Jayapura mencapai 22,55 persen. Hal ini menunjukkan angkatan kerja di Kota Jayapura berpotensi memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar tenaga kerja.

Sebaliknya, dari grafik tersebut dapat disimpulkan pula bahwa kualitas angkatan kerja di Kabupaten Puncak masih rendah. Ini terlihat dari persentase yang tinggi dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan rendah di kabupaten tersebut. Pada tahun 2022, persentase angkatan kerja dengan pendidikan rendah di Kabupaten Puncak mencapai 99,81 persen. Diperlukan perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten ini guna menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas.

Peningkatan pendidikan angkatan kerja menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan dan persaingan di pasar tenaga kerja yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Melalui peningkatan pendidikan, angkatan kerja dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pekerjaan yang terus berkembang, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, pendidikan yang lebih baik juga dapat membuka peluang akses ke pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan mobilitas sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanah Papua ini.



Gambar 12. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2022

BAB 5

“UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA”

Rata-rata upah/gaji
buruh/karyawan/
pegawai selama
sebulan di Papua
tahun **2022** adalah

3,95 juta rupiah



UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

"The payment of fair wages for all workers is not a question of charity or generosity, but of justice and respect for human rights. (Memberikan upah yang adil kepada semua pekerja bukanlah soal belas kasihan atau kemurahan hati, tetapi merupakan masalah keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia"

— International Labour Organization (ILO)

1. KILM 15. Upah dan Biaya Tenaga Kerja

Upah dalam aktivitas ekonomi merupakan indikator utama dari daya beli pekerja dan merupakan proksi untuk tingkat pendapatan mereka. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk yang bekerja. Namun dengan keterbatasan data yang dikumpulkan dalam Sakernas, yaitu hanya menanyakan upah/pendapatan sebulan terakhir pada status pekerjaan tertentu. Upah merujuk pada imbalan yang diberikan kepada pekerja sebagai hasil dari kerja yang dilakukan, baik berupa uang maupun barang. Dengan demikian, pada publikasi ini hanya disajikan rata-rata upah/ gaji bersih sebulan terakhir buruh/karyawan/pegawai. Sakernas juga tidak mendata biaya kompensasi, sehingga indikator tersebut tidak dapat disajikan dalam publikasi ini. Berikut adalah rata-rata upah/gaji buruh/karyawan/pegawai selama sebulan di Papua selama tiga tahun terakhir:

Tabel 15. Rata-rata Upah/Gaji Buruh/Karyawan/Pegawai selama Sebulan (juta rupiah), 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata upah/gaji buruh/karyawan/pegawai selama sebulan	3,98	3,95	3,95
Perkotaan	4,28	4,19	4,23
Perdesaan	3,49	3,56	3,31
Laki-laki	4,21	4,14	4,17
Perempuan	3,38	3,47	3,39

Sumber: Sakernas 2020-2022, data diolah

Dalam tiga tahun terakhir, tercatat rata-rata upah/gaji buruh/pegawai/karyawan sebulan di Papua secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 rata-rata upah/gaji bersih per bulan bagi buruh, karyawan, dan pegawai di Papua mencapai 3,95 juta rupiah. Data ini menunjukkan bahwa besaran rata-rata upah/gaji bersih masih cenderung stagnan, karena angka tersebut sama dengan kondisi pada tahun 2021. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat penurunan sebesar 30 ribu rupiah dalam besaran rata-rata upah/gaji buruh, pegawai, dan karyawan di Papua pada tahun 2022.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, terdapat perbedaan dalam rata-rata upah/gaji bersih per bulan bagi buruh, karyawan, dan pegawai antara daerah perkotaan dan perdesaan pada periode yang sama di Papua. Secara umum, rata-rata upah/gaji bersih per bulan di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Terdapat peningkatan dalam rata-rata upah/gaji bersih per bulan di daerah perkotaan jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020, terjadi penurunan. Di sisi lain, di wilayah perdesaan terjadi penurunan rata-rata upah/gaji bersih per bulan, baik jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 maupun 2020.

Sebagai gambaran, terdapat peningkatan sebesar 40 ribu rupiah dalam rata-rata upah/gaji bersih per bulan di daerah perkotaan jika dibandingkan dengan tahun 2021, namun terjadi penurunan sebesar 50 ribu rupiah jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020. Di daerah perdesaan, terjadi penurunan rata-rata upah/gaji bersih sebulan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020, dengan penurunan sebesar 250 ribu rupiah dan 180 ribu rupiah secara berturut-turut. Penting untuk memperhatikan dan memahami perbedaan ini guna menciptakan kesetaraan upah yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

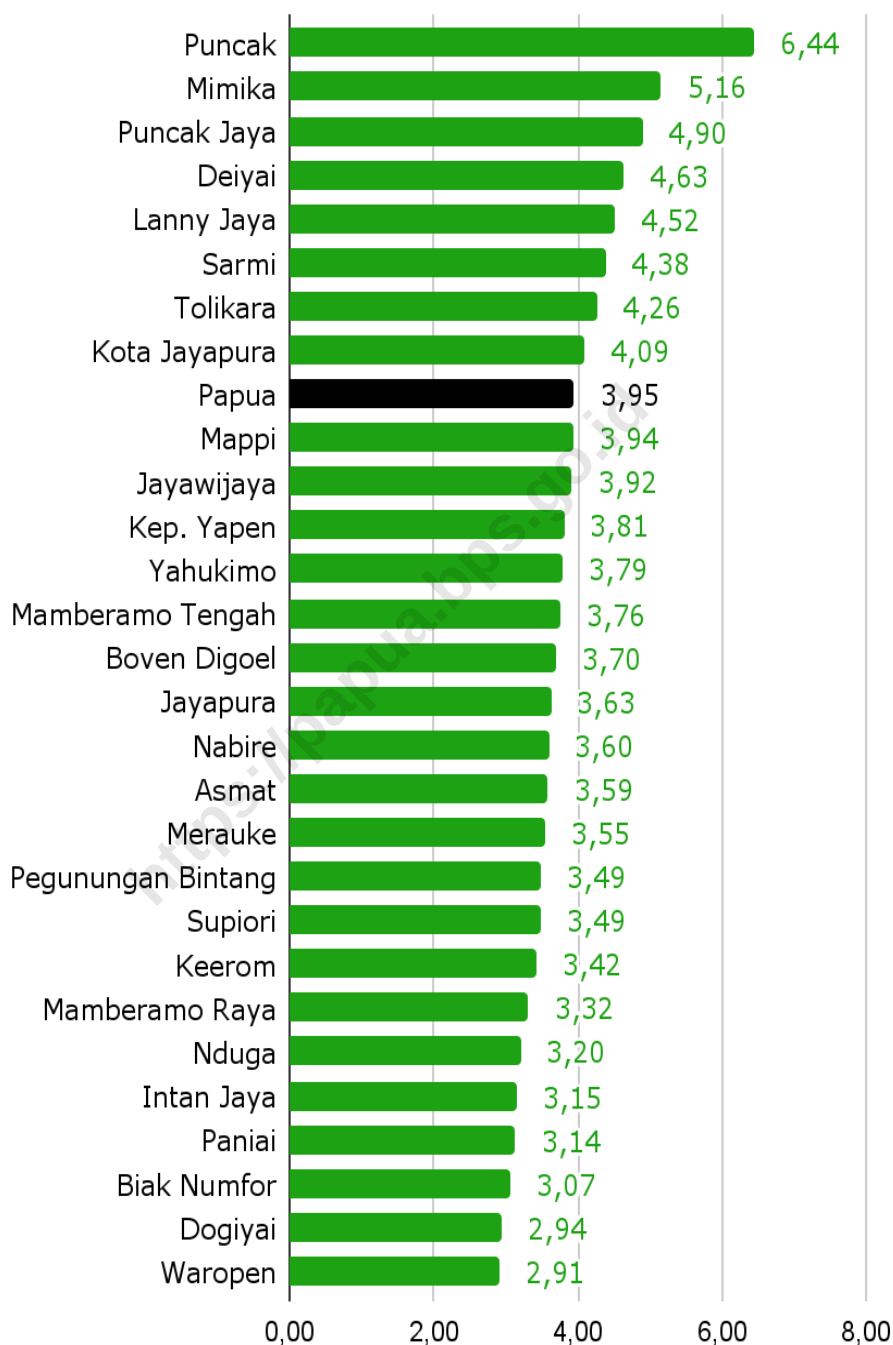
Sementara itu, jika kita melihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan yang konsisten dalam rata-rata upah/gaji bagi buruh/karyawan/pegawai sebulan antara laki-laki dan perempuan. Rata-rata upah/gaji bagi laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2022, rata-rata upah/gaji sebulan bagi laki-laki mencapai 4,17 juta rupiah, sementara perempuan hanya sebesar 3,39 juta rupiah. Terdapat peningkatan dalam rata-rata upah/gaji

sebulan bagi laki-laki jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021, namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Dalam pola yang berbeda, rata-rata upah/gaji sebulan bagi perempuan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 (turun sebesar 80 ribu rupiah), namun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 (naik sebesar 10 ribu rupiah). Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, yang dapat mencerminkan kondisi ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya untuk mendorong kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan serta mewujudkan kesempatan yang adil bagi kedua jenis kelamin dalam hal pendapatan yang layak.

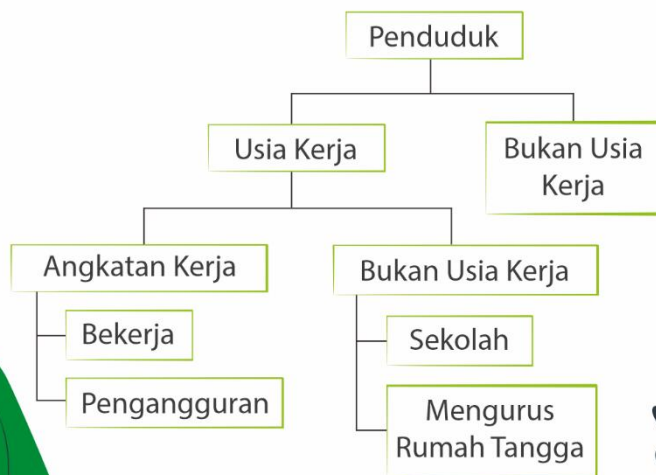
Selanjutnya, pada tahun 2022 terlihat bahwa rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai tertinggi berdasarkan provinsi secara berturut-turut diduduki oleh Kabupaten Puncak dengan jumlah 6,44 juta rupiah, diikuti oleh Kabupaten Mimika dengan 5,16 juta rupiah, dan Kabupaten Puncak Jaya dengan 4,90 juta rupiah. Rata-rata upah/gaji bersih per bulan di ketiga kabupaten tersebut lebih tinggi daripada rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai di seluruh Provinsi Papua pada tahun 2022 yang mencapai 3,95 juta rupiah.

Di sisi lain, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai terendah pada tahun 2022 diduduki oleh Kabupaten Waropen dengan jumlah 2,91 juta rupiah, diikuti oleh Kabupaten Dogiyai dengan 2,94 juta rupiah, dan Kabupaten Biak Numfor dengan 3,01 juta rupiah. Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas upah antara kabupaten-kabupaten tersebut, di mana beberapa kabupaten memiliki rata-rata upah/gaji bersih yang lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini juga menggambarkan perbedaan dalam tingkat penghasilan dan kondisi ekonomi antara wilayah-wilayah di Provinsi Papua.



**Gambar 13. Rata-rata Upah/Gaji Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Kabupaten/Kota (juta rupiah), 2022**

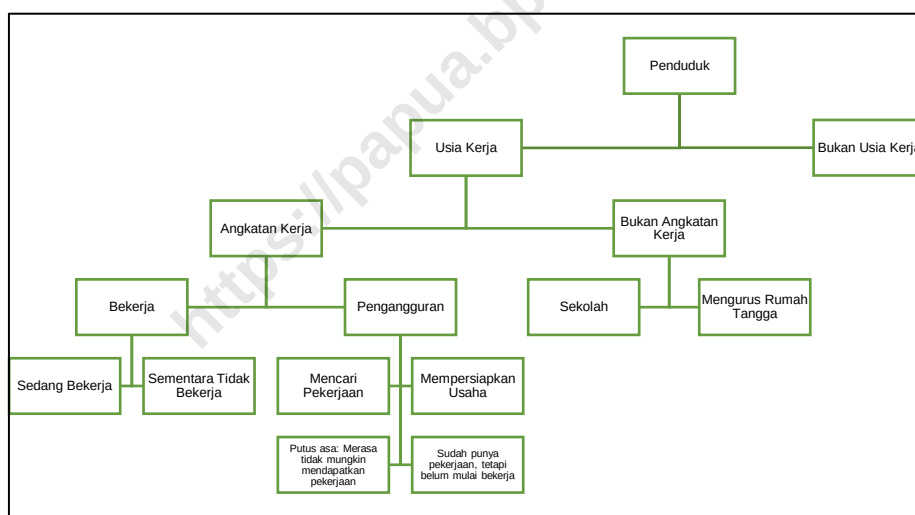
PENJELASAN TEKNIS



PENJELASAN TEKNIS

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku "Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment, and Underemployment: An ILO Manual on Concepts and Methods", ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah **Konsep Dasar Angkatan Kerja** (Standard Labor Force Concept), seperti pada gambar di bawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur

kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja selanjutnya dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur Kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokkan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur lima tahun). Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasi masing-masing negara. Sebagai contoh, beberapa negara yang telah menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas diantaranya adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Meksiko (65 tahun).

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (termasuk punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/ melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial misalkan berorganisasi, kerja bakti, dsb).

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berurut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rusia, dan lainnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. **Mempersiapkan usaha baru** adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Sementara itu, **mempersiapkan suatu usaha** yang dimaksud adalah apabila “tindakannya nyata”, seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Selanjutnya, **merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa)** adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. **Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja** adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. **Kriteria satu jam** berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada di

suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), sehingga apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total. Selain itu, hal ini juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Ini diperlukan terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the onehour criterion*, yaitu digunakannya konsep atau definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*). BPS menggunakan konsep/definisi "bekerja paling sedikit satu jam berturut-turut dalam seminggu yang lalu", untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*) tanpa melihat lapangan pekerjaan, jabatan, maupun status pekerjaannya.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	95.387	87.710	183.097
Jayawijaya	82.551	78.790	161.341
Kabupaten Jayapura	52.308	46.411	98.719
Nabire	61.029	52.178	113.207
Kepulauan Yapen	37.368	35.955	73.323
Biak Numfor	57.974	55.308	113.282
Paniai	63.952	59.695	123.647
Puncak Jaya	55.308	47.082	102.390
Mimika	95.436	70.165	165.601
Boven Digoel	28.062	22.759	50.821
Mappi	35.199	34.056	69.255
Asmat	34.755	33.819	68.574
Yahukimo	72.923	67.421	140.344
Pegunungan Bintang	28.513	25.405	53.918
Tolikara	57.880	50.556	108.436
Sarmi	16.548	13.999	30.547
Keerom	24.735	20.440	45.175
Waropen	12.626	11.912	24.538
Supiori	7.702	7.698	15.400
Mamberamo Raya	8.591	8.271	16.862
Nduga	42.519	34.759	77.278
Lanny Jaya	78.021	67.379	145.400
Mamberamo Tengah	20.816	18.407	39.223
Yalimo	27.091	23.607	50.698
Puncak	43.028	39.517	82.545
Dogiyai	33.927	34.830	68.757
Intan Jaya	19.429	18.462	37.891
Deiyai	28.210	27.039	55.249
Kota Jayapura	131.291	113.940	245.231
Provinsi Papua	1.353.179	1.207.570	2.560.749

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

**Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur,
2020-2022**

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke atas	2.449.145	2.494.142	2.560.749
Laki-laki	1.300.741	1.325.019	1.353.179
Perempuan	1.148.404	1.169.123	1.207.570
Perkotaan	730.420	750.644	775.024
Perdesaan	1.718.725	1.743.498	1.785.725
(15-24)	549.850	550.270	600.370
Laki-laki	288.020	287.698	307.266
Perempuan	261.830	262.572	293.104
Perkotaan	165.216	167.815	173.269
Perdesaan	384.634	382.455	427.101
(25-34)	610.440	606.336	591.401
Laki-laki	314.880	314.855	306.027
Perempuan	295.560	291.481	285.374
Perkotaan	170.678	169.572	173.248
Perdesaan	439.762	436.764	418.153
(35-54)	956.765	978.707	973.081
Laki-laki	511.039	522.405	521.368
Perempuan	445.726	456.302	451.713
Perkotaan	264.416	268.813	273.400
Perdesaan	692.349	709.894	699.681
(55-64)	238.363	358.829	271.635
Laki-laki	134.975	200.061	147.620
Perempuan	103.388	158.768	124.015
Perkotaan	87.234	94.404	100.882
Perdesaan	151.129	156.806	170.753
65 Tahun ke atas	93.727	107.619	124.262
Laki-laki	51.827	59.282	70.898
Perempuan	41.900	48.337	53.364
Perkotaan	42.876	50.040	54.225
Perdesaan	50.851	57.579	70.037

Sumber: Sakernas 2020-2022, data diolah

Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	72.305	42.006	114.311
Jayawijaya	75.396	65.583	140.979
Kabupaten Jayapura	39.576	24.724	64.300
Nabire	51.216	28.561	79.777
Kepulauan Yapen	29.929	20.196	50.125
Biak Numfor	47.591	34.318	81.909
Paniai	54.612	41.722	96.334
Puncak Jaya	53.333	44.811	98.144
Mimika	82.557	32.834	115.391
Boven Digoel	24.116	14.314	38.430
Mappi	28.039	13.802	41.841
Asmat	29.769	25.329	55.098
Yahukimo	69.580	57.636	127.216
Pegunungan Bintang	24.953	23.919	48.872
Tolikara	51.843	45.088	96.931
Sarmi	13.480	7.586	21.066
Keerom	21.591	12.178	33.769
Waropen	10.441	3.540	13.981
Supiori	5.881	3.547	9.428
Mamberamo Raya	7.438	3.217	10.655
Nduga	39.980	31.668	71.648
Lanny Jaya	76.241	65.572	141.813
Mamberamo Tengah	19.879	18.090	37.969
Yalimo	24.598	21.237	45.835
Puncak	42.406	38.040	80.446
Dogiyai	27.046	29.245	56.291
Intan Jaya	17.155	13.214	30.369
Deiyai	23.716	15.815	39.531
Kota Jayapura	92.134	56.504	148.638
Provinsi Papua	1.156.801	834.296	1.991.097

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2020-2022

Indikator	Tahun		
	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke atas	1.767.403	1.952.777	1.991.097
Laki-laki	1.038.467	1.144.918	1.156.801
Perempuan	728.936	807.859	834.296
Perkotaan	469.440	487.794	496.249
Perdesaan	1.297.963	1.464.983	1.494.848
(15-24)	283.698	300.519	345.319
Laki-laki	159.396	173.774	188.809
Perempuan	124.302	126.745	156.510
Perkotaan	57.269	60.514	67.390
Perdesaan	226.429	240.005	277.929
(25-34)	485.863	520.758	506.351
Laki-laki	280.273	298.632	290.410
Perempuan	205.590	222.126	215.941
Perkotaan	128.318	128.802	128.776
Perdesaan	357.545	391.956	377.575
(35-54)	769.412	879.554	863.046
Laki-laki	453.891	512.061	508.803
Perempuan	315.521	367.493	354.243
Perkotaan	207.694	218.294	213.579
Perdesaan	561.718	661.260	649.467
(55-64)	180.543	251.946	209.418
Laki-laki	112.379	160.451	125.409
Perempuan	68.164	91.495	84.369
Perkotaan	56.390	64.142	66.499
Perdesaan	124.153	135.481	142.919
65 Tahun ke atas	47.887	52.323	66.963
Laki-laki	32.528	35.402	43.730
Perempuan	15.359	16.921	23.233
Perkotaan	19.769	16.042	20.005
Perdesaan	28.118	36.281	46.958

Sumber: Sakernas 2020-2022, data diolah

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	75,80	47,89	62,43
Jayawijaya	91,33	83,24	87,38
Kabupaten Jayapura	75,66	53,27	65,13
Nabire	83,92	54,74	70,47
Kepulauan Yapen	80,09	56,17	68,36
Biak Numfor	82,09	62,05	72,31
Paniai	85,40	69,89	77,91
Puncak Jaya	96,43	95,18	95,85
Mimika	86,51	46,80	69,68
Boven Digoel	85,94	62,89	75,62
Mappi	79,66	40,53	60,42
Asmat	85,65	74,90	80,35
Yahukimo	95,42	85,49	90,65
Pegunungan Bintang	87,51	94,15	90,64
Tolikara	89,57	89,18	89,39
Sarmi	81,46	54,19	68,96
Keerom	87,29	59,58	74,75
Waropen	82,69	29,72	56,98
Supiori	76,36	46,08	61,22
Mamberamo Raya	86,58	38,89	63,19
Nduga	94,03	91,11	92,71
Lanny Jaya	97,72	97,32	97,53
Mamberamo Tengah	95,50	98,28	96,80
Yalimo	90,80	89,96	90,41
Puncak	98,55	96,26	97,46
Dogiyai	79,72	83,96	81,87
Intan Jaya	88,30	71,57	80,15
Deiyai	84,07	58,49	71,55
Kota Jayapura	70,18	49,59	60,61
Provinsi Papua	85,49	69,09	77,75

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	69.784	41.512	111.296
Jayawijaya	75.172	65.174	140.346
Kabupaten Jayapura	36.594	23.885	60.479
Nabire	49.814	27.211	77.025
Kepulauan Yapen	29.110	19.209	48.319
Biak Numfor	43.334	32.514	75.848
Paniai	53.509	41.065	94.574
Puncak Jaya	53.291	44.764	98.055
Mimika	78.910	30.143	109.053
Boven Digoel	22.140	14.152	36.292
Mappi	27.281	13.582	40.863
Asmat	29.655	24.964	54.619
Yahukimo	68.318	57.222	125.540
Pegunungan Bintang	24.383	23.017	47.400
Tolikara	51.843	44.743	96.586
Sarmi	13.307	7.318	20.625
Keerom	20.978	11.951	32.929
Waropen	9.612	3.441	13.053
Supiori	5.605	3.547	9.152
Mamberamo Raya	7.191	3.217	10.408
Nduga	39.692	31.587	71.279
Lanny Jaya	75.688	65.330	141.018
Mamberamo Tengah	19.520	18.090	37.610
Yalimo	24.360	21.142	45.502
Puncak	42.270	38.021	80.291
Dogiyai	24.723	29.012	53.735
Intan Jaya	17.060	12.658	29.718
Deiyai	23.306	15.640	38.946
Kota Jayapura	81.733	52.473	134.206
Provinsi Papua	1.118.183	816.584	1.934.767

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

Lampiran 7. Ratio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	73,16	47,33	60,79
Jayawijaya	91,06	82,72	86,99
Kabupaten Jayapura	69,96	51,46	61,26
Nabire	81,62	52,15	68,04
Kepulauan Yapen	77,90	53,43	65,90
Biak Numfor	74,75	58,79	66,96
Paniai	83,67	68,79	76,49
Puncak Jaya	96,35	95,08	95,77
Mimika	82,68	42,96	65,85
Boven Digoel	78,90	62,18	71,41
Mappi	77,51	39,88	59,00
Asmat	85,33	73,82	79,65
Yahukimo	93,69	84,87	89,45
Pegunungan Bintang	85,52	90,60	87,91
Tolikara	89,57	88,50	89,07
Sarmi	80,41	52,28	67,52
Keerom	84,81	58,47	72,89
Waropen	76,13	28,89	53,20
Supiori	72,77	46,08	59,43
Mamberamo Raya	83,70	38,89	61,72
Nduga	93,35	90,87	92,24
Lanny Jaya	97,01	96,96	96,99
Mamberamo Tengah	93,77	98,28	95,89
Yalimo	89,92	89,56	89,75
Puncak	98,24	96,21	97,27
Dogiyai	72,87	83,30	78,15
Intan Jaya	87,81	68,56	78,43
Deiyai	82,62	57,84	70,49
Kota Jayapura	62,25	46,05	54,73
Provinsi Papua	82,63	67,62	75,55

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

**Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja
Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2022**

Kabupaten/Kota	Status Pekerjaan Utama			
	Berusaha	Buruh/ Karyawan	Pekerja Bebas	Pekerja Keluarga
(1)	(2)	(3)	(4)	
Merauke	52.897	33.065	7.067	18.267
Jayawijaya	75.913	8.830	47	55.556
Kabupaten Jayapura	34.693	17.469	898	7.419
Nabire	38.208	26.835	1.416	10.566
Kepulauan Yapen	28.290	10.901	533	8.595
Biak Numfor	39.073	18.989	3.266	14.520
Paniai	61.180	2.395	312	30.687
Puncak Jaya	78.604	1.252	-	18.199
Mimika	47.458	46.836	327	14.432
Boven Digoel	15.879	13.023	153	7.237
Mappi	28.197	6.214	819	5.633
Asmat	28.369	9.352	1.950	14.948
Yahukimo	49.876	3.338	-	72.326
Pegunungan Bintang	22.758	6.479	295	17.868
Tolikara	48.877	1.803	-	45.906
Sarmi	10.653	5.020	389	4.563
Keerom	15.442	7.426	407	9.654
Waropen	7.036	4.736	118	1.163
Supiori	4.802	2.205	54	2.091
Mamberamo Raya	6.820	488	-	3.100
Nduga	37.980	870	-	32.429
Lanny Jaya	70.420	4.402	-	66.196
Mamberamo Tengah	18.066	1.591	-	17.953
Yalimo	20.562	-	38	24.902
Puncak	26.968	149	-	53.174
Dogiyai	31.162	694	156	21.723
Intan Jaya	14.089	111	-	15.518
Deiyai	25.778	258	-	12.910
Kota Jayapura	54.455	61.803	2.601	15.347
Provinsi Papua	994.505	296.534	20.846	622.882

Sumber: Sakernas 2022, data diolah. Ket: “-”= data tidak tersedia.

Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2022

Kabupaten/Kota	Lapangan Pekerjaan Utama		
	Primer	Sekunder	Tersier
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	49.712	22.064	39.520
Jayawijaya	114.453	1.864	24.029
Kabupaten Jayapura	27.131	7.433	25.915
Nabire	27.293	10.922	38.810
Kepulauan Yapen	27.347	4.605	16.367
Biak Numfor	36.326	6.451	33.071
Paniai	89.695	447	4.432
Puncak Jaya	92.929	18	5.108
Mimika	36.085	19.346	53.622
Boven Digoel	18.677	5.402	12.213
Mappi	31.427	657	8.779
Asmat	38.363	3.123	13.133
Yahukimo	120.473	53	5.014
Pegunungan Bintang	40.441	318	6.641
Tolikara	93.162	148	3.276
Sarmi	12.786	1.236	6.603
Keerom	22.742	3.639	6.548
Waropen	5.542	773	6.738
Supiori	6.022	412	2.718
Mamberamo Raya	8.984	44	1.380
Nduga	70.187	0	1.092
Lanny Jaya	134.214	0	6.804
Mamberamo Tengah	35.635	0	1.975
Yalimo	44.800	0	702
Puncak	80.104	121	66
Dogiyai	52.544	0	1.191
Intan Jaya	29.438	0	280
Deiyai	37.870	0	1.076
Kota Jayapura	12.627	29.624	91.955
Provinsi Papua	1.397.009	118.700	419.058

Sumber: Sakernas 2022, data diolah. Ket: "-" = data tidak tersedia.

Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Kabupaten/Kota	Pekerja Paruh Waktu	% Terhadap Penduduk Bekerja =>15tahun
(1)	(2)	(3)
Merauke	40.329	36,24
Jayawijaya	32.272	22,99
Kabupaten Jayapura	33.014	54,59
Nabire	17.885	23,22
Kepulauan Yapen	20.160	41,72
Biak Numfor	23.141	30,51
Paniai	68.767	72,71
Puncak Jaya	29.571	30,16
Mimika	8.800	8,07
Boven Digoel	14.401	39,68
Mappi	16.566	40,54
Asmat	13.581	24,86
Yahukimo	64.100	51,06
Pegunungan Bintang	12.752	26,90
Tolikara	67.631	70,02
Sarmi	10.868	52,69
Keerom	13.138	39,90
Waropen	5.644	43,24
Supiori	4.653	50,84
Mamberamo Raya	7.843	75,36
Nduga	58.204	81,66
Lanny Jaya	48.701	34,54
Mamberamo Tengah	31.477	83,69
Yalimo	4.223	9,28
Puncak	26.067	32,47
Dogiyai	30.101	56,02
Intan Jaya	22.999	77,39
Deiyai	22.031	56,57
Kota Jayapura	14.458	10,77
Provinsi Papua	763.377	39,46

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

Lampiran 11. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2022

Kabupaten/Kota	Jam Kerja			
	0 jam*	1-14 jam	15-24 jam	25-44 jam
(1)	(2)	(3)	(4)	
Merauke	3.493	7.204	20.566	43.907
Jayawijaya	1.184	2.831	8.958	85.638
Kabupaten Jayapura	681	4.373	17.673	24.146
Nabire	1.363	5.896	5.722	30.565
Kepulauan Yapen	134	1.489	9.408	23.867
Biak Numfor	1.052	4.762	10.866	39.060
Paniai	-	2.010	44.171	47.839
Puncak Jaya	-	3.847	24.109	62.243
Mimika	803	1.744	1.744	41.643
Boven Digoel	812	2.156	6.385	15.796
Mappi	3.701	3.070	9.651	20.344
Asmat	-	519	5.431	25.650
Yahukimo	93	1.588	17.813	98.661
Pegunungan Bintang	82	867	9.041	22.793
Tolikara	1.779	1.962	29.481	62.868
Sarmi	218	3.353	6.832	7.509
Keerom	461	1.394	5.369	18.835
Waropen	211	718	2.720	7.315
Supiori	77	1.013	2.296	3.995
Mamberamo Raya	-	2.889	3.618	2.662
Nduga	-	2.016	20.078	49.153
Lanny Jaya	-	4.109	7.459	108.568
Mamberamo Tengah	-	2.110	13.204	22.216
Yalimo	-	745	759	43.960
Puncak	28	85	15.619	59.056
Dogiyai	156	2.805	20.096	29.887
Intan Jaya	-	-	15.666	13.163
Deiyai	-	-	13.228	25.225
Kota Jayapura	2.634	2.638	4.578	51.249
Provinsi Papua	18.962	68.193	352.541	1.087.813

Sumber: Sakernas 2022, data diolah, keterangan: *sementara tidak bekerja

Lampiran 12. Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja, 2022 (lanjutan)

Kabupaten/Kota	Jam Kerja			
	45-59 jam	60-74 jam	75 jam+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	
Merauke	20.973	8.833	6.320	111.296
Jayawijaya	39.874	1.682	179	140.346
Kabupaten Jayapura	9.078	4.022	506	60.479
Nabire	23.534	8.095	1.850	77.025
Kepulauan Yapen	8.175	4.442	804	48.319
Biak Numfor	13.627	4.872	1.609	75.848
Paniai	489	65	-	94.574
Puncak Jaya	7.856	-	-	98.055
Mimika	33.843	18.628	10.648	109.053
Boven Digoel	8.482	1.934	727	36.292
Mappi	3.750	266	81	40.863
Asmat	19.069	1.900	2.050	54.619
Yahukimo	6.704	415	266	125.540
Pegunungan Bintang	11.671	2.684	262	47.400
Tolikara	496	-	-	96.586
Sarmi	2.305	274	134	20.625
Keerom	5.096	1.497	277	32.929
Waropen	1.166	923	-	13.053
Supiori	1.017	691	63	9.152
Mamberamo Raya	1.191	48	-	10.408
Nduga	32	-	-	71.279
Lanny Jaya	19.962	920	-	141.018
Mamberamo Tengah	80	-	-	37.610
Yalimo	38	-	-	45.502
Puncak	5.503	-	-	80.291
Dogiyai	745	46	-	53.735
Intan Jaya	889	-	-	29.718
Deiyai	435	58	-	38.946
Kota Jayapura	34.881	29.066	9.160	134.206
Provinsi Papua	280.961	91.361	34.936	1.934.767

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

Lampiran 13. Jumlah dan Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Formal-Informal, 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah		Persentase	
	Formal	Informal	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Merauke	34.788	76.508	31,26	68,74
Jayawijaya	9.060	131.286	6,46	93,54
Kabupaten Jayapura	17.830	42.649	29,48	70,52
Nabire	28.259	48.766	36,69	63,31
Kepulauan Yapen	11.187	37.132	23,15	76,85
Biak Numfor	19.522	56.326	25,74	74,26
Paniai	2.395	92.179	2,53	97,47
Puncak Jaya	1.252	96.803	1,28	98,72
Mimika	47.786	61.267	43,82	56,18
Boven Digoel	13.433	22.859	37,01	62,99
Mappi	6.527	34.336	15,97	84,03
Asmat	9.412	45.207	17,23	82,77
Yahukimo	3.554	121.986	2,83	97,17
Pegunungan Bintang	6.479	40.921	13,67	86,33
Tolikara	1.951	94.635	2,02	97,98
Sarmi	5.318	15.307	25,78	74,22
Keerom	7.728	25.201	23,47	76,53
Waropen	4.972	8.081	38,09	61,91
Supiori	2.231	6.921	24,38	75,62
Mamberamo Raya	488	9.920	4,69	95,31
Nduga	870	70.409	1,22	98,78
Lanny Jaya	4.402	136.616	3,12	96,88
Mamberamo Tengah	1.611	35.999	4,28	95,72
Yalimo	-	45.502	-	100,00
Puncak	149	80.142	0,19	99,81
Dogiyai	694	53.041	1,29	98,71
Intan Jaya	121	29.597	0,41	99,59
Deiyai	308	38.638	0,79	99,21
Kota Jayapura	65.037	69.169	48,46	51,54
Provinsi Papua	307.364	1.627.403	15,89	84,11

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	3,49	1,18	2,64
Jayawijaya	0,30	0,62	0,45
Kabupaten Jayapura	7,53	3,39	5,94
Nabire	2,74	4,73	3,45
Kepulauan Yapen	2,74	4,89	3,60
Biak Numfor	8,94	5,26	7,40
Paniai	2,02	1,57	1,83
Puncak Jaya	0,08	0,10	0,09
Mimika	4,42	8,20	5,49
Boven Digoel	8,19	1,13	5,56
Mappi	2,70	1,59	2,34
Asmat	0,38	1,44	0,87
Yahukimo	1,81	0,72	1,32
Pegunungan Bintang	2,28	3,77	3,01
Tolikara	-	0,77	0,36
Sarmi	1,28	3,53	2,09
Keerom	2,84	1,86	2,49
Waropen	7,94	2,80	6,64
Supiori	4,69	-	2,93
Mamberamo Raya	3,32	-	2,32
Nduga	0,72	0,26	0,52
Lanny Jaya	0,73	0,37	0,56
Mamberamo Tengah	1,81	-	0,95
Yalimo	0,97	0,45	0,73
Puncak	0,32	0,05	0,19
Dogiyai	8,59	0,80	4,54
Intan Jaya	0,55	4,21	2,14
Deiyai	1,73	1,11	1,48
Kota Jayapura	11,29	7,13	9,71
Provinsi Papua	3,34	2,12	2,83

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

Lampiran 15. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan		
	Pendidikan Dasar ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	0,00	4,87	1,78
Jayawijaya	0,20	1,89	0,88
Kabupaten Jayapura	5,39	7,62	2,40
Nabire	0,31	4,60	11,01
Kepulauan Yapen	0,00	6,70	10,89
Biak Numfor	4,50	12,30	3,60
Paniai	1,42	5,10	0,00
Puncak Jaya	0,00	1,14	0,00
Mimika	3,08	8,30	2,36
Boven Digoel	5,31	6,91	2,94
Mappi	1,93	3,49	4,39
Asmat	0,34	0,00	6,98
Yahukimo	1,15	5,51	2,03
Pegunungan Bintang	3,04	3,78	1,14
Tolikara	0,00	4,28	0,00
Sarmi	1,72	3,52	0,00
Keerom	0,16	8,49	2,36
Waropen	2,33	14,80	0,00
Supiori	0,00	8,10	5,96
Mamberamo Raya	2,75	0,00	0,00
Nduga	0,46	1,53	0,00
Lanny Jaya	0,65	0,00	0,00
Mamberamo Tengah	0,69	2,42	0,00
Yalimo	0,00	4,39	-
Puncak	0,19	0,00	0,00
Dogiyai	4,57	4,63	0,00
Intan Jaya	2,27	0,00	-
Deiyai	0,90	12,97	0,00
Kota Jayapura	2,72	14,44	7,98
Provinsi Papua	1,22	7,76	4,88

Sumber: Sakernas 2022, data diolah, Keterangan: "-" = data tidak tersedia.

Lampiran 16. Persentase Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan		
	Pendidikan Dasar ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	0,00	92,24	7,76
Jayawijaya	36,81	55,13	8,06
Kabupaten Jayapura	43,13	52,08	4,79
Nabire	4,54	46,55	48,91
Kepulauan Yapen	0,00	63,95	36,05
Biak Numfor	29,27	64,31	6,42
Paniai	66,70	33,30	0,00
Puncak Jaya	0,00	100,00	0,00
Mimika	23,32	72,10	4,58
Boven Digoel	54,96	39,34	5,71
Mappi	63,60	25,97	10,43
Asmat	31,52	0,00	68,48
Yahukimo	82,34	14,32	3,34
Pegunungan Bintang	84,78	13,18	2,04
Tolikara	0,00	100,00	0,00
Sarmi	47,17	52,83	0,00
Keerom	4,29	90,60	5,12
Waropen	18,00	82,00	0,00
Supiori	0,00	73,91	26,09
Mamberamo Raya	100,00	0,00	0,00
Nduga	85,64	14,36	0,00
Lanny Jaya	100,00	0,00	0,00
Mamberamo Tengah	58,77	41,23	0,00
Yalimo	0,00	100,00	0,00
Puncak	100,00	0,00	0,00
Dogiyai	93,43	6,57	0,00
Intan Jaya	100,00	0,00	0,00
Deiyai	57,26	42,74	0,00
Kota Jayapura	7,81	73,67	18,52
Provinsi Papua	31,32	57,01	11,66

Sumber: Sakernas 2021, data diolah, Keterangan: "-"-= data tidak tersedia.

Lampiran 17. Persentase Setengah Penganggur Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan		
	Pendidikan Dasar ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	40,52	47,25	12,23
Jayawijaya	72,94	19,78	7,28
Kabupaten Jayapura	19,52	71,19	9,29
Nabire	39,62	48,76	11,62
Kepulauan Yapen	49,11	46,80	4,09
Biak Numfor	42,74	53,20	4,06
Paniai	95,98	4,02	-
Puncak Jaya	92,54	7,05	0,41
Mimika	41,89	49,75	8,36
Boven Digoel	46,76	44,49	8,75
Mappi	93,13	6,02	0,85
Asmat	86,70	5,34	7,95
Yahukimo	92,44	5,77	1,80
Pegunungan Bintang	92,38	5,92	1,70
Tolikara	90,62	8,97	0,40
Sarmi	56,56	43,44	-
Keerom	67,79	32,21	-
Waropen	49,24	37,88	12,88
Supiori	41,53	49,19	9,28
Mamberamo Raya	93,91	6,09	-
Nduga	100,00	-	-
Lanny Jaya	70,33	22,44	7,22
Mamberamo Tengah	84,42	9,50	6,08
Yalimo	100,00	-	-
Puncak	100,00	-	-
Dogiyai	83,17	16,83	-
Intan Jaya	85,80	14,20	-
Deiyai	93,25	6,75	-
Kota Jayapura	23,77	57,98	18,25
Provinsi Papua	75,04	21,44	3,52

Sumber: Sakernas 2022, data diolah, Keterangan: "- "=" data tidak tersedia.

Lampiran 18. Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota, 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	23.082	45.704	68.786
Jayawijaya	7.155	13.207	20.362
Kabupaten Jayapura	12.732	21.687	34.419
Nabire	9.813	23.617	33.430
Kepulauan Yapen	7.439	15.759	23.198
Biak Numfor	10.383	20.990	31.373
Paniai	9.340	17.973	27.313
Puncak Jaya	1.975	2.271	4.246
Mimika	12.879	37.331	50.210
Boven Digoel	3.946	8.445	12.391
Mappi	7.160	20.254	27.414
Asmat	4.986	8.490	13.476
Yahukimo	3.343	9.785	13.128
Pegunungan Bintang	3.560	1.486	5.046
Tolikara	6.037	5.468	11.505
Sarmi	3.068	6.413	9.481
Keerom	3.144	8.262	11.406
Waropen	2.185	8.372	10.557
Supiori	1.821	4.151	5.972
Mamberamo Raya	1.153	5.054	6.207
Nduga	2.539	3.091	5.630
Lanny Jaya	1.780	1.807	3.587
Mamberamo Tengah	937	317	1.254
Yalimo	2.493	2.370	4.863
Puncak	622	1.477	2.099
Dogiyai	6.881	5.585	12.466
Intan Jaya	2.274	5.248	7.522
Deiyai	4.494	11.224	15.718
Kota Jayapura	39.157	57.436	96.593
Provinsi Papua	196.378	373.274	569.652

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

Lampiran 19. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	17,08	42,65	29,31
Jayawijaya	10,34	21,84	15,86
Kabupaten Jayapura	19,62	46,09	32,03
Nabire	14,33	41,67	26,91
Kepulauan Yapen	25,99	46,49	36,06
Biak Numfor	21,56	39,98	30,53
Paniai	9,73	11,93	10,74
Puncak Jaya	4,48	13,47	8,61
Mimika	15,88	61,91	35,23
Boven Digoel	10,12	32,75	20,28
Mappi	21,30	56,42	38,4
Asmat	10,60	27,28	18,84
Yahukimo	6,07	23,77	14,53
Pegunungan Bintang	9,28	15,36	12,12
Tolikara	8,48	10,43	9,39
Sarmi	20,08	44,88	31,43
Keerom	12,49	35,96	23,09
Waropen	19,52	69,29	43,61
Supiori	22,52	40,58	31,44
Mamberamo Raya	9,16	58,09	33,16
Nduga	2,95	1,00	2,07
Lanny Jaya	6,08	2,29	4,34
Mamberamo Tengah	4,44	3,83	4,16
Yalimo	6,42	6,20	6,32
Puncak	8,75	12,60	10,57
Dogiyai	15,61	27,82	21,8
Intan Jaya	15,54	32,99	24,25
Deiyai	9,20	21,14	14,99
Kota Jayapura	24,98	49,30	36,25
Provinsi Papua	13,59	30,90	21,71

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

Lampiran 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2022

Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan		
	Pendidikan Dasar ke Bawah	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	56,38	32,12	11,51
Jayawijaya	82,79	13,10	4,10
Kabupaten Jayapura	47,53	40,63	11,84
Nabire	49,75	34,92	15,33
Kepulauan Yapen	53,66	34,41	11,93
Biak Numfor	48,13	38,69	13,18
Paniai	86,09	11,94	1,97
Puncak Jaya	91,39	7,92	0,68
Mimika	41,62	47,72	10,67
Boven Digoel	57,57	31,65	10,78
Mappi	77,07	17,38	5,55
Asmat	80,43	11,05	8,52
Yahukimo	94,41	3,43	2,17
Pegunungan Bintang	84,10	10,50	5,40
Tolikara	90,75	8,32	0,93
Sarmi	57,44	31,43	11,13
Keerom	68,07	26,53	5,40
Waropen	51,33	36,77	11,90
Supiori	60,48	26,71	12,81
Mamberamo Raya	84,40	14,12	1,48
Nduga	95,15	4,83	0,02
Lanny Jaya	86,34	10,81	2,85
Mamberamo Tengah	80,37	16,09	3,54
Yalimo	83,44	16,56	-
Puncak	99,81	0,15	0,03
Dogiyai	92,78	6,45	0,77
Intan Jaya	94,47	5,53	-
Deiyai	94,63	4,88	0,49
Kota Jayapura	27,93	49,52	22,55
Provinsi Papua	72,46	20,78	6,76

Sumber: Sakernas 2022, data diolah

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 9912

0967-534519 53308 (Hunting) 

bps9400@bps.go.id 

papua.bps.go.id 